

ISSN (online): 2089-7995
ISSN (print): 2089-7847

Quantitative *e*conomics Journal

Volume: 05, Number: 04, Desember 2016

Volatilitas Indeks Komposit Pasar Modal Asean-3

Ahmad Fauzan Priyono

178-190

Analisis Kinerja Perpajakan Daerah di Kota Medan

Dede Ruslan

191-208

Analisis Pemasaran Jagung di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Rahmanta

209-219

Analisis Keseimbangan Tingkat Suku Bunga dan GDP di Indonesia : Tinjauan Interaksi Kebijakan Fiskal dan Moneter (1998 – 2011)

Vietha Devia

220-239

Department of Economics
Postgraduate Program State University of Medan

CONTENTS/DAFTAR ISI

QUANTITATIVE ECONOMICS JOURNAL

Volume 05, Number 04, Desember 2016

ISSN (online) : 2089-7995

ISSN (print) : 2089-7847

Volatilitas Indeks Komposit Pasar Modal Asean-3 <i>Anhar Fauzan Priyono</i>	178-190
Analisis Kinerja Perpajakan Daerah di Kota Medan <i>Dede Ruslan</i>	191-208
Analisis Pemasaran Jagung di Kabupaten Labuhanbatu Selatan <i>Rahmanta</i>	209-219
Analisis Keseimbangan Tingkat Suku Bunga dan GDP di Indonesia: Tinjauan Interaksi Kebijakan Fiskal dan Moneter (1998 – 2011) <i>Vietha Devia</i>	220-239

QUANTITATIVE ECONOMICS JOURNAL

Department of Economics
Post Graduate Program, State University of Medan

Editor in Chief/Ketua Dewan Redaksi

Prof. Indra Maipita, Ph.D - (SCOPUS ID : 55842182600)

Managing Editor / Editorial Board

Dr. H Haikal Rahman, M.Si

Dr. Eko W. Nugrahadhi

Dr. Fitrawaty, M.Si

Riswandi, M.Ec

Reviewer

Prof. Dr. Raja Masbar, M.Sc (Universitas Syiah Kuala)

Assoc.Prof. Dr. Mohd. Dan Jantan, M.Sc (University Utara Malaysia)

Assoc. Prof. Dr. Juzhar Jusoh (Universiti Utara Malaysia)

Dr. Kodrat Wibowo (Universitas Padjadjaran)

Dr. Dede Ruslan, M.Si (Universitas Negeri Medan)

Lukman Hakim, M.Si., Ph.D (Universitas Sebelas Maret)

Setyo Tri Wahyudi, M.Sc., Ph.D (Universitas Brawijaya)

Dr.Imam Mukhlis, S.E., M.Si (Universitas Negeri Malang)

Dr. Rahmanta Ginting, M.Si (Universitas Sumatera Utara)

Prof. Dr. HB. Isyandi, S.E., M.Sc (Universitas Riau)

Dr. Wawan Hermawan (Padjadjaran University)

Secretariat/Sekretariat

Dedy Husrizal Syah, S.E., M.Si

Yusri Effendi, S.Pd

Cover Design/Desain Kulit

Gamal Kartono, M.Hum

Web Developer

Dr. H Haikal Rahman, M.Si

Layout/tata Letak

M. Ihwani, M.Kom

Ahmad Suhaely, S.P

Nur Basuki, M.Pd

Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan dalam edisi online dan cetak. Berisi artikel bidang Ilmu Ekonomi baik hasil penelitian maupun rekayasa ide yang bersifat kuantitatif. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan di jurnal ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis.

Jurnal ini diterbitkan empat kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret (volume pertama), Juni (volume kedua), September (volume ketiga), dan Desember (volume keempat). Artikel dapat ditulis dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Semua isi jurnal ini dapat dilihat dan diunduh secara cuma-cuma pada alamat website: <http://qe-journal.unimed.ac.id>. Kami mengundang semua pihak untuk menulis pada jurnal ini. Paper dikirimkan dalam bentuk soft copy ke alamat <http://qe-journal.unimed.ac.id>. Setiap penulis dapat memantau artikel yang dikirimnya melalui laman tersebut, karena jurnal ini dikelola secara online penuh.

Pengantar Editorial

Volume kelima terbitan terakhir ini berisi empat artikel para dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Artikel pertama membahas Volatilitas Indeks Komposit Pasar Modal Asean-3. Artikel kedua berusaha untuk menganalisis Kinerja Perpajakan Daerah di Kota Medan. . Artikel berikutnya juga berusaha untuk menganalisis Pemasaran Jagung di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sedangkan yang terakhir membahas Analisis Keseimbangan Tingkat Suku Bunga dan GDP di Indonesia : Tinjauan Interaksi Kebijakan Fiskal dan Moneter (1998 – 2011),

Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas keilmuan.

Salam Kemajuan,

Editor in Chief,

Indra Maipita

VOLATILITAS INDEKS KOMPOSIT PASAR MODAL ASEAN-3

Anhar Fauzan Priyono
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Padjadjaran
Email: fauzan.fe@unpad.ac.id

Abstract

Rapid integration between domestic and world economy in the last decade has been a major issue. For Indonesia, the situation has been accelerated by the adoption of floating exchange rate regime in 1997, also with the development of Indonesia stock exchange.

One notable financial variable that often exposed to external shocks is stock market index. This research will analyzed the behavior of 3 major stock market indices in ASEAN, those are Jakarta Composite Index (JCI), Kuala Lumpur stock index (KLSE), and Singapore stock index (STI). The employment of volatility model is chosen to figured the behavior of those 3 indices, and to analyze the aggregate investment in each stock market. Observation will be based upon monthly basis, from 2010 until 2015.

The findings in this research are (i) similarity in the movement behavior of ASEAN-3 stock market indices, (ii) Indonesia stock market shows the highest aggregate investment return relative to Malaysia and Singapore, (iii) Singapore stock market shows the lowest aggregate investment risk relative to Indonesia and Malaysia, as the representation of more developed stock market.

Keywords : ASEAN-3, integration, aggregate investment, volatility model

PENDAHULUAN

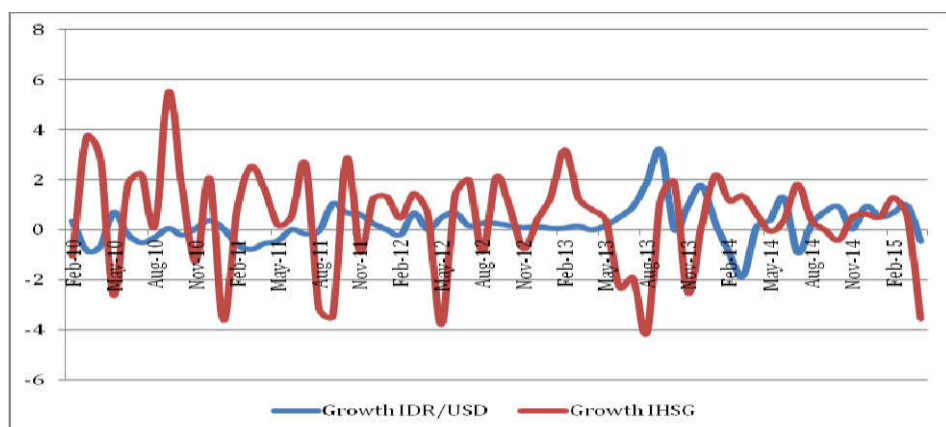
/ Integrasi perekonomian Indonesia dengan dunia semakin meningkat dalam dekade terakhir ini. Di lain pihak, sejak diterapkannya floating exchange rate regime di tahun 1997, perekonomian Indonesia akan makin rentan terhadap guncangan eksternal. Peningkatan kekuatan ekonomi Amerika Serikat akhir-akhir ini menjadi salah satu alasan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US Dollar, selain alasan kinerja perekonomian domestik.

Merujuk pada konsep makro ekonomi, dimana perdagangan internasional, dalam hal ini adalah aktivitas ekspor dan impor adalah fungsi dari nilai tukar, maka setiap penurunan (depresiasi), atau peningkatan (apresiasi) dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing utama dunia, akan dapat

berdampak secara langsung pada volume perdagangan. Di lain pihak, selain volume perdagangan (neraca berjalan/current account), komponen lainnya dalam neraca pembayaran (balance of payment), yaitu neraca modal (capital account) dimana pembentukan modal dapat berasal dari mekanisme portofolio dan investasi langsung (direct investment). Keseluruhan dari neraca-neraca tersebut memang memiliki keterkaitan dengan nilai tukar yang menjadi salah satu indikator makro ekonomi utama dari suatu negara.

Sektor lain yang cukup memberikan kontribusi terhadap kinerja perekonomian Indonesia adalah pasar modal. Pasar modal diyakini dapat menjadi sarana permodalan jangka pendek yang dalam prakteknya akan mampu menjadi alternatif pada saat melemahnya kinerja perbankan sebagai intermediasi keuangan. Bursa Efek Indonesia sendiri tergolong pasar modal yang masih berkembang, yang hingga saat ini, aktivitas perdagangannya masih lebih banyak dikuasai oleh investor asing relatif dari investor domestik. Kinerja Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) seringkali dijadikan indikator makro ekonomi Indonesia. Peningkatan dalam kinerja BEI akan menjadi indikator meningkatnya kinerja agregat dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar sebagai emiten.

Berikut adalah perkembangan pertumbuhan nilai tukar rupiah terhadap US Dollar, dan pertumbuhan IHSG Indonesia yang dipantau dalam frekuensi bulanan:

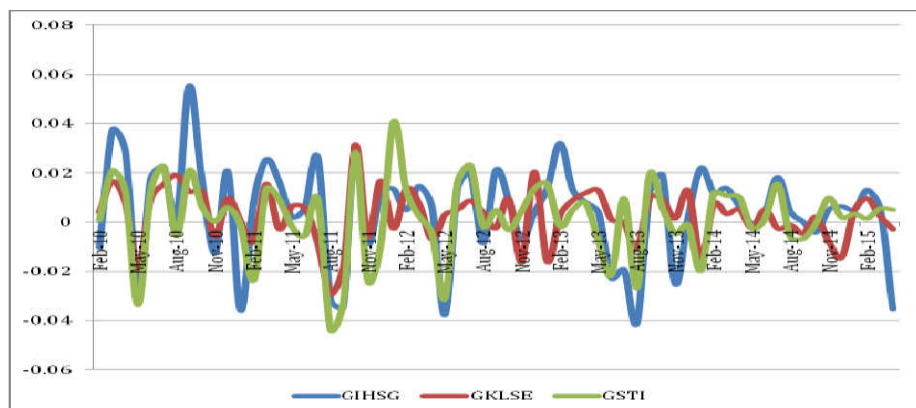


Gambar 1. Pertumbuhan Nilai Tukar Rupiah/US Dollar dan IHSG (%) Februari 2010 - April 2015

Keterangan : Rata-rata pertumbuhan nilai tukar bulanan Rupiah/US Dollar adalah 0,23% dengan standar deviasi 0,74%, sedangkan rata-rata pertumbuhan IHSG adalah 0,46% dengan standar deviasi 1,96%.

Dalam gambar (1) diatas, dapat dilihat bahwa volatilitas dari kedua indikator makro ekonomi tersebut cukup tinggi dan bervariasi, khususnya adalah volatilitas IHSG. Hal ini dapat dilihat dari cukup besarnya perbedaan antara nilai rata-rata kedua variabel tersebut dengan nilai standar deviasinya. Volatilitas atas kedua variabel tersebut tentunya akan menciptakan ketidaknyamanan dari dua aspek pengamatan ekonomi, yaitu dari sisi makro maupun mikro. Dalam sisi makro, volatilitas kedua variabel tersebut dapat menunjukkan country risk, sedangkan dari sisi mikro akan mempersulit pengambilan keputusan di area pengambilan kebijakan dan juga investor. Khusus dalam level perusahaan, utamanya yang tergolong Multi National Company (MNC), maka peramalan nilai tukar dan/atau indeks saham gabungan akan sangat berguna untuk upaya-upaya hedging, pembiayaan jangka pendek, keputusan investasi jangka pendek dan panjang, capital budgeting, serta perhitungan cash flow. Merujuk pada hal tersebut, maka nilai tukar dan juga indeks harga saham akan menjadi dua faktor yang dapat memengaruhi daya saing perusahaan-perusahaan tersebut.

Berikut adalah ilustrasi pergerakan pertumbuhan IHSG, KLSE (indeks Malaysia) dan STI (Indeks Singapura):.



Sumber: Yahoo Finance (diolah)

Gambar 2. Pergerakan Pertumbuhan IHSG (GIHSG), KLSE (GKLSE), dan STI (GSTI) Februari 2010 - April 2015

Gambar 2 diatas menunjukkan bahwa secara ilustratif terlihat adanya kesamaan pergerakan pertumbuhan diantara tiga indeks komposit pasar modal di ASEAN, yaitu IHSG, KLSE, dan STI. Pertumbuhan IHSG memperlihatkan dinamika yang cukup besar dibandingkan dengan pertumbuhan KLSE dan STI. Hal ini setidaknya memberikan indikasi adanya korelasi yang kuat diantara ketiga indeks komposit tersebut, yang kemudian akan diuji untuk mengetahui tingkat integrasinya.

Terdapat dua pendekatan dalam konteks forecasting pada literatur, untuk indeks saham gabungan (komposit), yaitu pendekatan fundamental dan teknikal. Pendekatan fundamental memanfaatkan analisa hubungan antara variabel-variabel ekonomi dalam melakukan proses forecasting, sedangkan pendekatan teknikal memanfaatkan perilaku historis.

Pendekatan teknikal memanfaatkan pola dan karakteristik historis dalam indeks saham komposit untuk memprediksikan pergerakan indeks saham komposit di masa yang akan datang. Pada pendekatan ini, dipercaya bahwa data runtut waktu memiliki karakteristik siklus dan/atau musiman, yang memiliki perulangan, sehingga dimungkinkan melakukan prediksi berbasis nilai historisnya.

Akgiray (1989) menemukan adanya volatility clustering (ARCH effect) pada pertumbuhan indeks harga saham, Schwert (1990) menemukan karakter yang sama, namun pada pasar derivatif, yaitu futures market, sedangkan Engle dan Mustafa (1992) menyimpulkan bahwa pada pertumbuhan harga saham individual (individual stock return) juga ditemui fenomena volatility clustering.

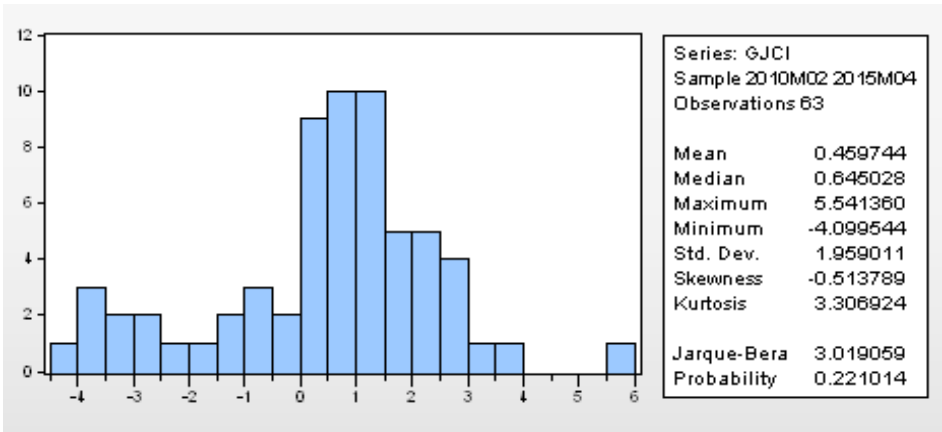
METODOLOGI PENELITIAN

Teknik permodelan yang akan dimanfaatkan dalam kajian ini serta dapat menjadi salah satu upaya meramalkan pergerakan indeks saham komposit, sekaligus pergerakan volatilitasnya adalah model volatilitas, yaitu Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) dan beberapa variannya. Teknik permodelan GARCH ini dianggap mampu menjelaskan fenomena volatility clustering, fat tail dan leptokurtosis yang terdapat pada data-data finansial seperti nilai tukar dan indeks harga saham gabungan.

Perhitungan pertumbuhan nilai tukar dan indeks harga saham gabungan adalah mengikuti formula berikut..

$$GJCI_t = \log \left(\frac{JCI_t}{JCI_{t-1}} \right) \dots\dots\dots(1)$$

dimana: GJCI = pertumbuhan indeks harga saham gabungan (Jakarta Composite Index).



Gambar 3. Statistik Deskriptif Pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan

Menurut Gambar (3), dapat diketahui bahwa terdapat indikasi volatility clustering dan non-linearity pada pergerakan historis dari pertumbuhan indeks harga saham gabungan. Hal ini dapat diketahui setidaknya melalui informasi nilai kurtosis yang melebihi batas normal (nilai kurtosis normal adalah maksimum 3), dan besaran standar deviasi untuk variabel tersebut yang jauh melebihi nilai rata-ratanya.

Pendekatan-pendekatan permodelan dalam basis model volatilitas yang akan dimanfaatkan dan kemudian dibandingkan kekuatan prediksinya dalam kajian ini adalah:

- (1) GARCH(p,q) model ; dan (2) GARCH in Mean (GARCH-M) model

Bollerslev (1986) dan Taylor (1986) mengemukakan bahwa GARCH memiliki kemampuan untuk mengakomodir nilai conditional variance untuk dipengaruhi oleh nilai sebelumnya. Persamaan umum untuk model GARCH(p,q) dengan ordo p = 1, dan q = 1, adalah sebagai berikut:

$$y_t = \mu + \phi y_{t-1} + u_t, \quad u_t \sim N(0, \sigma_t^2) \dots\dots\dots(2)$$

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 u_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2 \dots\dots\dots(3)$$

Proses estimasi kedua persamaan diatas, dimana persamaan (2) adalah persamaan conditional mean yang dapat dimanfaatkan untuk memprediksikan pergerakan suatu variabel (pertumbuhan nilai tukar dan juga pertumbuhan indeks harga saham gabungan), dan persamaan (3) yang merupan persamaan conditional variance, untuk memprediksikan pergerakan volatilitasnya, kemudian berlanjut pada spesifikasi log-likelihood function (LLF) sebagai berikut:

$$L = -\frac{T}{2} \log(2\pi) - \frac{1}{2} \sum_{t=1}^T \log(\sigma_t^2) - \frac{1}{2} \sum_{t=1}^T (y_t - \mu - \phi y_{t-1})^2 / \sigma_t^2 \dots\dots\dots(4)$$

GARCH in Mean (GARCH-M), sesuai dengan penjelasan Engle, Lilien dan Robins (1987) dalam Brooks (2002: 480), dapat dimanfaatkan untuk melihat hubungan antara resiko investasi dengan pergerakan pertumbuhan (return) dari investasi tersebut. Implementasinya adalah conditional variance (resiko) atas pertumbuhan asset akan dimasukkan ke dalam persamaan conditional mean dengan bentuk sebagai berikut:

$$y_t = \mu + \delta \sigma_t + u_t, u_t \sim N(0, \sigma_t^2) \dots\dots\dots(5)$$

Dalam persamaan (5) tersebut bila koefisien δ bernilai positif dan signifikan, maka dapat disimpulkan setiap peningkatan resiko investasi yang diwakili oleh meningkatnya conditional variance akan berdampak pada peningkatan dalam mean return.

Pengujian keberadaan volatility clustering atas variabel nilai tukar dan indeks harga saham gabungan akan memanfaatkan ARCH effect test. Tahapan pengujian ARCH effect yang dijelaskan Brooks (2008) dalam Priyono dan Bustaman (2014) adalah sebagai berikut:

1. Melakukan estimasi regresi linier seperti tampak dalam persamaan berikut:

$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-2} + \dots + \alpha_n y_{t-n} + e_t \dots\dots\dots(6)$$

dimana:

$$y_t = IHSG = \quad y_{t-1} = \text{tingkat kelambanan}$$

2. Residual yang didapat akan dimanfaatkan dalam persamaan berikut:

$$\hat{e}_t^2 = \gamma_0 + \gamma_1 \hat{e}_{t-1}^2 + \gamma_2 \hat{e}_{t-2}^2 + \dots + \gamma_q \hat{e}_{t-q}^2 + v_t \dots\dots\dots(7)$$

dimana v_t bersifat iid

3. Menghitung uji statistik yang didefinisikan sebagai TR^2 (jumlah observasi dikalikan dengan koefisien determinasi dari persamaan pada tahap 2), mengikuti distribusi $\chi^2(q)$.
4. Hipotesis-hipotesis berkaitan pengujian statistik pada tahap 3 adalah sebagai berikut:

$$H_0: \gamma_1 = 0 \text{ dan } \gamma_2 = 0 \text{ dan } \dots \text{ dan } \gamma_q = 0 \dots\dots\dots(8)$$

$$H_1: \gamma_1 \neq 0 \text{ atau } \gamma_2 \neq 0 \text{ atau } \dots \text{ atau } \gamma_q \neq 0 \dots\dots\dots(9)$$

Bila nilai uji statistik lebih besar daripada nilai kritis pada distribusi χ^2 , maka hipotesis nol ditolak.

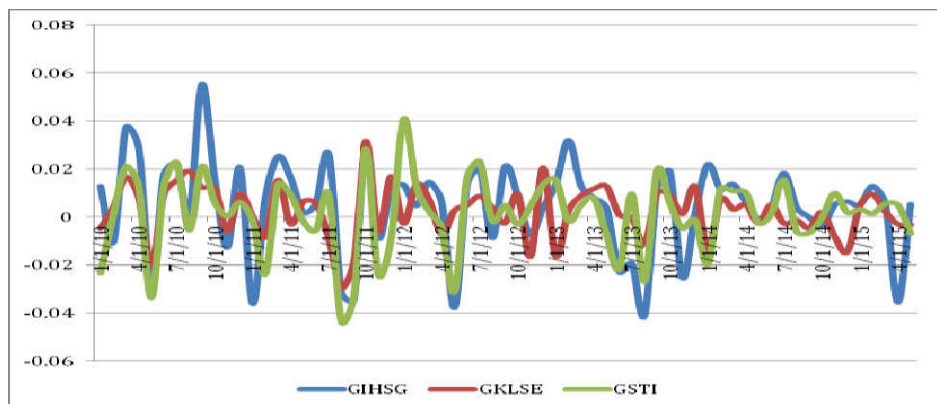
Selanjutnya, perbandingan kinerja peramalan dari kedua teknik permodelan tersebut akan dilakukan menurut beberapa informasi sebagai berikut:

- (1) Root Mean Squared Error (RMSE); (2) Mean Absolute Deviation (MAD);
- (3) Mean Absolute Percentage Error (MAPE); (4) Akaike Information Criterion (AIC); (5) Schwarz Criterion (SC); (6) Hannan-Quinn-Bayesian Criterion (HQBC)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Volatilitas pasar keuangan di negara-negara ASEAN-3 diukur dinamika pertumbuhan indeks harga saham komposit atas masing-masing negara yang sedang diamati. Pendekatan yang digunakan untuk mempelajari volatilitas pasar keuangan tersebut adalah model volatilitas dengan varian GARCH(1,1) dan GARCH-M secara khusus untuk melihat mekanisme risk and return dalam tiap pasar modal tersebut secara agregat. Negara-negara yang diamati adalah Indonesia (GIHSG), Malaysia (GKLSE), dan Singapura (GSTI).

Berikut adalah ilustrasi dari pergerakan pertumbuhan indeks harga komposit pasar modal-pasar modal tersebut diatas yang dipantau dalam frekuensi bulanan:



Sumber: Perhitungan Penulis

Gambar 4. Pertumbuhan Indeks Harga Komposit Pasar Modal ASEAN-3 (Januari 2010 - Mei 2015)

Berdasarkan Gambar.4 tersebut diatas dapat dibuat kesimpulan awal bahwa volatilitas pertumbuhan IHSG (GIHSG) adalah yang paling tinggi dibandingkan pertumbuhan indeks KLSE (GKLSE) dan pertumbuhan indeks Singapura (GSTI). GKLSE memperlihatkan volatilitas yang paling rendah diantara kedua kinerja volatilitas pasar modal lainnya. Dalam periode sekitar Oktober 2011 hingga awal 2012, volatilitas GSTI sedikit lebih tinggi, bahkan jika dibandingkan dengan GIHSG.

Hasil permodelan perilaku pertumbuhan indeks pasar modal negara-negara di ASEAN-3 adalah sebagai berikut:

1. Pasar Modal Indonesia (GIHSG):

Persamaan conditional mean untuk melihat perilaku pergerakan pertumbuhan IHSG adalah sebagai berikut (z-statistik dalam kurung):

$$GIHSG_t = 0.0064 - 0.211GIHSG_{t-4} \dots\dots\dots(10)$$

(15.39)*** (-1.68)*

keterangan: ***, **, dan * berturut-turut adalah signifikan pada level 1%, 5%, dan 10%

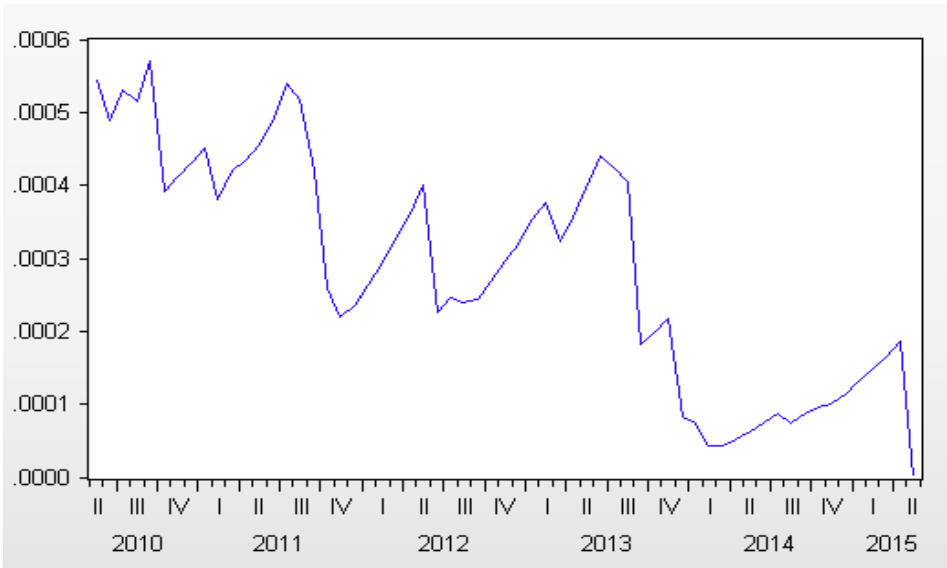
Persamaan conditional variance untuk melihat perilaku volatilitas pertumbuhan IHSG adalah sebagai berikut (z-statistik dalam kurung):

$$(\sigma_e^2)_t = 5.86 * 10^{-6} - 0.127e^2_{t-1} + 1.09\sigma^2_{e,t-1} \dots\dots\dots(11)$$

(1.03) (-2.31)** (18.66)***

keterangan: ***, **, dan * berturut-turut adalah signifikan pada level 1%, 5%, dan 10%

Sedangkan ilustrasi pergerakan volatilitas GIHSG yang memperlihatkan proksi resiko investasi agregat di pasar modal Indonesia adalah sebagai berikut:



Sumber: Perhitungan Penulis

Gambar 5. Volatilitas GIHSG

Dalam Gambar.5 dapat diketahui bahwa risiko investasi agregat di pasar modal Indonesia memperlihatkan kecenderungan menurun, walaupun terdapat fluktuasi di tiap tahun dengan pola yang cenderung sama. Pola yang dimaksud adalah meningkatnya risiko investasi di tiap kuartal ke-2 di tiap tahun, dan menurun di kuartal berikutnya.

2. Pasar Modal Malaysia (GKLSE):

Persamaan conditional mean untuk melihat perilaku pergerakan pertumbuhan KLSE adalah sebagai berikut (z-statistik dalam kurung):

$$GKLSE_t = 0.003 - 0.269GKLSE_{t-13}(12)$$

(1.94)*
(-2.94)***

keterangan: ***, **, dan * berturut-turut adalah signifikan pada level 1%, 5%, dan 10%

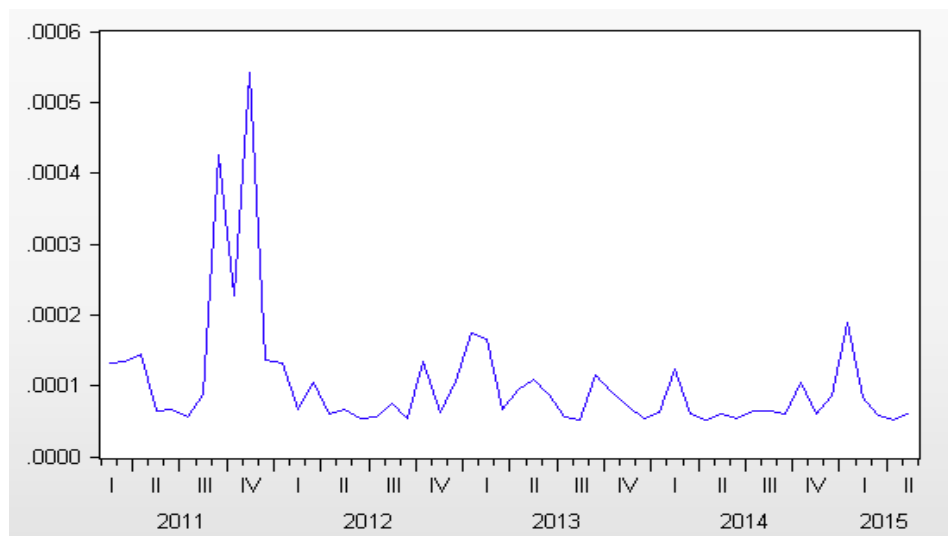
Persamaan conditional variance untuk melihat perilaku volatilitas pertumbuhan KLSE adalah sebagai berikut (z-statistik dalam kurung):

$$(\sigma_u^2)_t = 4.24 * 10^{-5} + 0.459u_{t-1}^2 + 0.149\sigma_{u,t-1}^2 \dots\dots\dots(13)$$

(1.47) (1.18) (0.361)

keterangan: ***,**, dan * berturut-turut adalah signifikan pada level 1%, 5%, dan 10%

Sedangkan ilustrasi pergerakan volatilitas GKLSE yang memperlihatkan proksi risiko investasi agregat di pasar modal Malaysia adalah sebagai berikut:



Sumber: Perhitungan Penulis

Gambar 6. Volatilitas GKLSE

Dalam Gambar.6 dapat diketahui bahwa risiko investasi agregat di pasar modal Malaysia cenderung stabil dan rendah selama periode observasi, terkecuali pada kuartal ke-3 dan ke-4 di tahun 2011.

3. Pasar Modal Singapura (GSTI):

Persamaan conditional mean untuk melihat perilaku pergerakan pertumbuhan STI adalah sebagai berikut (z-statistik dalam kurung):

$$GSTI_t = 0.0008 - 0.228GSTI_{t-4} \dots\dots\dots(14)$$

(0.359) (-1.76)*

keterangan: ***, **, dan * berturut-turut adalah signifikan pada level 1%, 5%, dan 10%

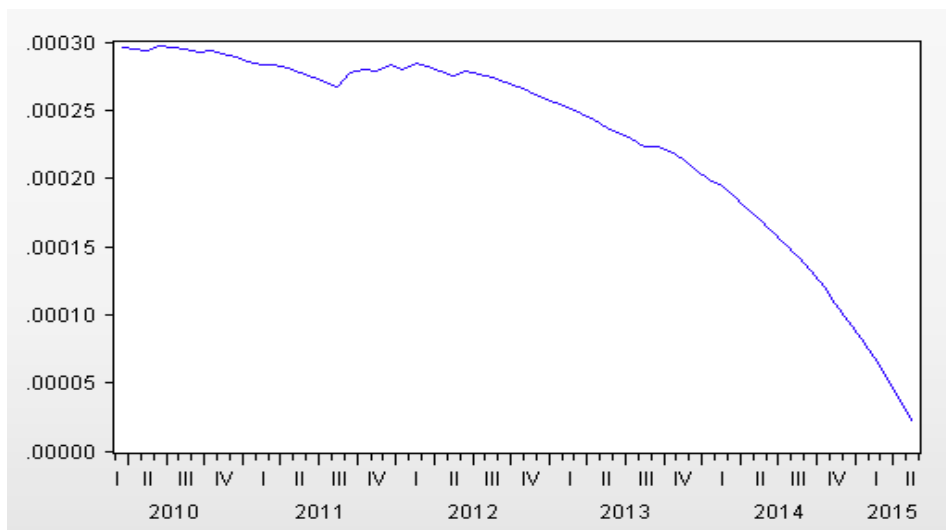
Persamaan conditional variance untuk melihat perilaku volatilitas pertumbuhan STI adalah sebagai berikut (z-statistik dalam kurung):

$$(\sigma_z^2)_t = -1.87 * 10^{-5} + 0.007z_{t-1}^2 + 1.05\sigma_{z,t-1}^2 \dots\dots\dots(15)$$

(-0.66) (0.184) (8.38)**

keterangan: ***, **, dan * berturut-turut adalah signifikan pada level 1%, 5%, dan 10%

Sedangkan ilustrasi pergerakan volatilitas GSTI yang memperlihatkan proksi resiko investasi agregat di pasar modal Singapura adalah sebagai berikut:



Sumber: Perhitungan Penulis

Gambar 7. Volatilitas GSTI

Dalam Gambar.7 dapat diketahui bahwa risiko investasi agregat pada pasar modal di Singapura menunjukkan trend yang menurun cukup tajam selama periode observasi.

KESIMPULAN

Arah pergerakan atau perilaku indeks saham gabungan (komposit) di ASEAN-3, yaitu di Indonesia, Malaysia, dan Singapura menunjukkan karakter yang sama. Hal ini lebih dikarenakan adanya integrasi keuangan

yang tinggi diantara pasar modal regional, maupun reaksi dari dinamika perekonomian global di antara negara-negara tersebut.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pada periode tahun 2010 – 2015 (dipantau pada frekuensi bulanan), pasar modal Indonesia menunjukkan rata-rata pertumbuhan indeks bulanan yang tertinggi dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. Di lain pihak didapatkan informasi bahwa resiko investasi agregat di pasar modal Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun, sementara pasar modal Malaysia cenderung stabil. Pasar modal Singapura menunjukkan trend resiko investasi agregat yang juga menurun, namun tingkatannya lebih rendah daripada pasar modal Indonesia dan Malaysia. Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan salah satu gambaran bahwa Singapura sebagai negara yang memiliki pasar modal yang telah maju, menunjukkan kinerja yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat resiko investasi agregatnya yang lebih rendah. Pasar modal Indonesia yang masih berkembang, dapat diarahkan menuju pasar modal yang lebih baik. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan peran Otoritas Jasa Keuangan, khususnya dalam pengawasan pasar modal, untuk menjamin terciptanya perdagangan efek yang efisien. Efisiensi perdagangan efek dapat tercapai pada saat seluruh dana dapat teralokasikan pada saham-saham dimana emiten-nya memiliki *future discounted cashflow* yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, K., T. Jappelli, A. Menichini, M. Padula, and M. Pagana. 2002. "Analyze, Compare, and Apply Alternative Indicators and Monitoring Methodologies to Measure the Evolution of Capital Market Integration in the European Union". Center for Studies in Economics and Finance. University of Salerno.
- Akgiray, V. 1989. "Conditional Heteroskedasticity in Time Series of Stock Returns: Evidence and Forecasts". *Journal of Business*, vol. 62, 55 – 80.
- Bollerslev, T. 1986. "Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity". *Journal of Econometrics* 3: 307 – 327.
- Brooks, Chris. 2002. *Introductory Econometrics for Finance*. Cambridge University Press.

- Cassel G. (1923), *Money and Foreign Exchange*. Macmillan, New York
- Dornbusch R. (1973), "Currency Depreciation, Hoarding and relative Prices". *Journal of political Economy*, pp. 893-915.
- Dornbusch R. (1979), "Monetary policy under Exchange Rate Flexibility", in *Managed Exchange Rate Flexibility: The Recent Experience*. Federal Reserve Bank of Boston, Conference Series Volume 20, pp. 90-122.
- Engle, R., D. Lilien & R. Robins. 1987. "Estimating Time-Varying Risk Premia in the Term Structure: The ARCH-M Model". *Econometrica* 55: 391 – 407.
- Fama E. F. (1965), "The Behavior of Stock Market Prices". *Journal of Business*, n. 38, pp. 34–105.
- Mandelbrot B. B. (1963), "The variation of certain speculative prices". *Journal of Business*, n. 36, pp. 394–419.
- Meese R., Rogoff K. (1983), "Empirical Exchange Rate Models of the Seventies: How well do they fit out of sample?". *Journal of International Economics*, pp. 3-24.
- Mundell R. (1968), *International Economics*, MacMillan, New York.
- Park, Cyn-Young. 2013. "Asian Capital Market Integration: Theory and Evidence". ADB Economics Working Paper Series No. 351, June 2013.
- Priyono, A.F., and Bustaman, A. 2013. "Volatility Transmission between Exchange Rates and Stock Prices in Indonesia: Post 1997 Asia Crisis". Working Paper in Economics and Development Studies (WoPEDS) 201404, Department of Economics, Padjadjaran University.
- Samuelson P.(1964), "Theoretical Notes on Trade Problems", in *Review of Economics and Statistics*, pp. 145-154.
- Schwert, G. William. 1989. "Why Does Stock Market Volatility Change Over Time". *Journal of Finance*, 45, 1115 – 1153.
- Taylor, S. 1986. *Modeling Financial Time Series*. John Wiley & Sons..

ANALISIS KINERJA PERPAJAKAN DAERAH DI KOTA MEDAN

Dede Ruslan

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan

Email: dras_ruslan@yahoo.com

Abstract

Delegation of authority taxation (tax assignment) was good to regional governments tend to date still lacks clear standards and universal. Tax assignment and restructuring of taxes and levies in a sustainable course can only be done by revising Law No. 28 of 2009 which is the basis in the management of local taxes and levies. How the performance of local taxation in Medan running has been the material of interest to be studied. Assessment approach used in this study digunakan kualitatif research and quantitative research. Whereas in other research used to obtain a quantitative description on the contributions and the rate of development of local taxes to the local tax revenue and the performance of Medan, through analytical tools tax elasticity, tax ratio and TPI. The results showed that the performance of local taxes through tax elasticity is known that the average percentage change in local taxes to the percentage change in the GDP amounted to 1.99%, while the ratio of the tax does not show improvement every year. Tax ratio that existed during the period 2011-2015 ranged from 0.62% to 0.85%. For the effectiveness of the tax is relatively stable with rata-rata average at 0.79 and when viewed from the level of efficiency since the year 2011 to 2015 ranged from 0% to 2.15%. In an average rate of 0.04% CCER only. These values were lower and included in the category of good..

Keywords : tax performance, tax elasticity, tax ratio and CCER.

PENDAHULUAN

Pendelegasian kewenangan perpajakan (*tax assignment*) yang baik kepada pemerintah daerah cenderung sampai saat ini masih kurang memiliki standar yang jelas dan universal. Meski demikian, *tax*

assignment merupakan keniscayaan sejalan dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang didelegasikan ke daerah terutama untuk meningkatkan kemandirian, akuntabilitas, efisiensi penyediaan barang publik, dan

kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, peningkatan rasio pajak daerah terhadap pendapatan daerah menjadi salah satu faktor yang ikut mendorong pemerintah untuk terus melakukan *tax assignment*. Di samping *tax assignment*, aspek lain yang sangat penting dalam kebijakan desentralisasi fiskal Indonesia adalah restrukturisasi pajak dan retribusi daerah.

Tax assignment dan restrukturisasi pajak dan retribusi daerah secara berkelanjutan tentu saja hanya bisa dilakukan dengan merevisi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang merupakan dasar dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap kemungkinan pendaerahan beberapa jenis pajak daerah seperti Pajak Tanah dan Bangunan di sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (tidak termasuk tubuh bumi) dan penerapan sistem untuk PPh, serta restrukturisasi pajak dan retribusi daerah dengan mengelompokkan pajak-pajak sejenis, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan Pajak Reklame menjadi pajak barang dan jasa tertentu, dan menggabungkan semua jenis retribusi perizinan di daerah menjadi *business license tax*. Apabila revisi Undang-Undang ini telah selesai maka Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sudah barang tentu mengalami penyesuaian. Agar kajian ini dapat memiliki jangkauan waktu cukup panjang maka antisipasi revisi UU 28 Tahun 2009 ini masuk sebagai faktor yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan studi ini.

Tujuan perubahan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : (1) Memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, (2) Penguatan perpajakan daerah (local taxing empowerment), (3) Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah, (4) Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Sebagaimana diketahui, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) mengamanatkan bahwa, PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan akan dikelola oleh Pemerintah Daerah paling lambat mulai bulan Januari 2014, sedangkan BPHTB dikelola oleh Pemerintah Daerah mulai Januari 2011. Di kalangan praktisi PBB termasuk pencermatan dari widyaiswara Pusdiklat Pajak yang kompetensinya mengajar materi PBB dan BPHTB, terdapat beberapa pasal

yang menggelitik untuk dikomentari antara lain pasal 81, pasal 87 ayat (4) dan pasal 90 ayat (1) huruf d beserta penjelasan dari masing-masing pasal tersebut. Adapun tujuan dari Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Permasalahan yang terlebih dahulu perlu dianalisis untuk mencermati masalah tersebut diatas diantaranya adalah melihat bagaimana kinerja perpajakan daerah di Kota Medan berjalan selama ini.

Menurut Sumitro (1988) Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum". "Dapat di paksakan" mempunyai arti, apabila utang pajak tidak di bayar, utang tersebut di tagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang dan sandera.

Sementara itu menurut Brotodiharjo, R (1982) pajak adalah iuran rakyat kepada negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan yang dapat di gunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah".

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerinta daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Davey (1988:39-40) ada beberapa pengertian tentang pajak daerah antara lain (1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri; (2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah; (3) Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah; (4) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasilnya diberikan kepada, dibagihasilkan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah adalah “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah”.

Pajak merupakan komponen penerimaan yang sangat penting. Menurut Mikesell and Hay (1969,75) : *“Taxes are of special importance because : (1) they provide a verry large portion of the revenue of governmental units on all levels, (2) they are compulsory contributions to the cost of government, whether the affected taxpayer approves or disapproves of the levy.*

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu (Sedarmayanti, 2009: 59). Dimana semakin besar persentase target yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya. Efektivitas pajak adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan target (potensi) penerimaan pajak yang telah dicapai (realisasi pajak). Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Jadi, efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Puspitasari, 2014 dalam Halim, 2004). Untuk menghitung tingkat efektivitas dalam pemungutan pajak dapat menggunakan rumus sebagai berikut (Puspitasari, 2014 dalam Halim, 2004):

$$Efektivitas Pajak = \frac{Realisasi Penerimaan Pajak}{Target Penerimaan Pajak} \times 100\%$$

METODOLOGI KAJIAN

Pendekatan kajian yang digunakan dalam penelitian ini digunakan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif digunakan untuk memperoleh gambaran secara objektif tentang kontribusi dan laju perkembangan pajak daerah terhadap PAD serta kinerja pajak daerah Kota Medan, melalui alat analitis

$$\text{Tax Elasticity} = \frac{\% \text{Perubahan Penerimaan Pajak Daerah}}{\% \text{Perubahan PDRB}}$$

$$\text{Tax Ratio} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{PDRB}}$$

$$TPI = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}}$$

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

Kinerja Perpajakan Daerah Kota Medan

Penerimaan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan daerah yang dikelola dan dimanfaatkannya sepenuhnya oleh daerah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Oleh karena itu perkembangannya berkaitan erat dengan upaya fiskal (*fiscal effort*) yang dilakukan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi penerimaan yang dimiliki oleh daerah lainnya. Gambaran komposisi PAD Kota Medan periode tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

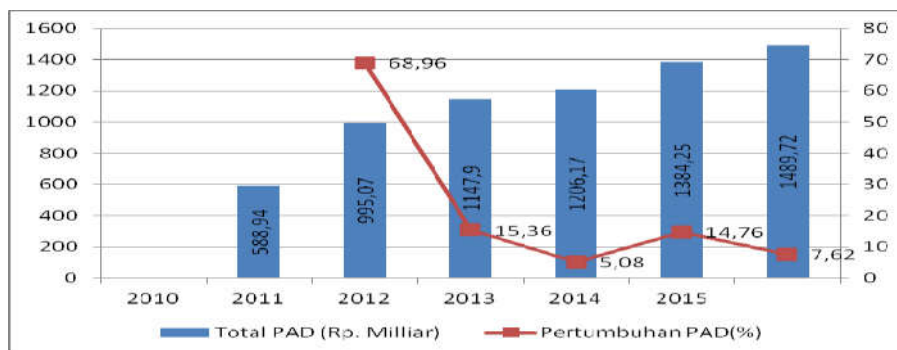
Tabel 1 Komposisi PAD Kota Medan Tahun 2010-2015 (Dlm Rp Milliar)

Komposisi Pendapatan Asli Daerah		Realisasi					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pajak Daerah	308,12	609,38	892,67	881,35	962,73	996,03
2	Retribusi Daerah	212,16	236,69	127,84	188,46	171,01	200,16

3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9,53	11,73	9,78	9,5	5,7	8,52
4	Lain-Lain PAD yang sah	59,13	127,27	117,61	126,86	244,81	185,01
Total PAD (Rp. Milyar)		588,94	995,07	1147,9	1206,17	1384,25	1489,72

Sumber : Laporan Realisai APBD Kota Medan : Badan Pengelola Keuangan Daerah (Berbagai tahun, diolah)

Berdasarkan Tabel 1 diatas diperoleh gambaran bahwa realisasi PAD dari tahun ketahun mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan PAD untuk tahun 2010-2015 adalah sebesar 22,36%. Pertumbuhan PAD tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 68,96% dan pertumbuhan terendah pada tahun 2013 yaitu sebesar 5,08%. Pertumbuhan untuk tahun 2014 ke 2015 adalah sebesar 7,62%. Pergerakan PAD Kota Medan tahun digambarkan dalam gambar 1 sebagai berikut :



Sumber : Laporan Realisai APBD Kota Medan : Badan Pengelola Keuangan Daerah (Berbagai tahun, diolah)

Gambar 1. PAD dan Pertumbuhan

Untuk mengidentifikasi dan menganalisis sektor-sektor mana saja dari PAD yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah di Pemerintah Kota Medan, berikut rincian perkembangan sumber pendapatan asli daerah yang ditunjukkan dalam tabel 2. Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa sumber-sumber PAD untuk Kota Medan selama periode 2010-2015, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami terus peningkatan

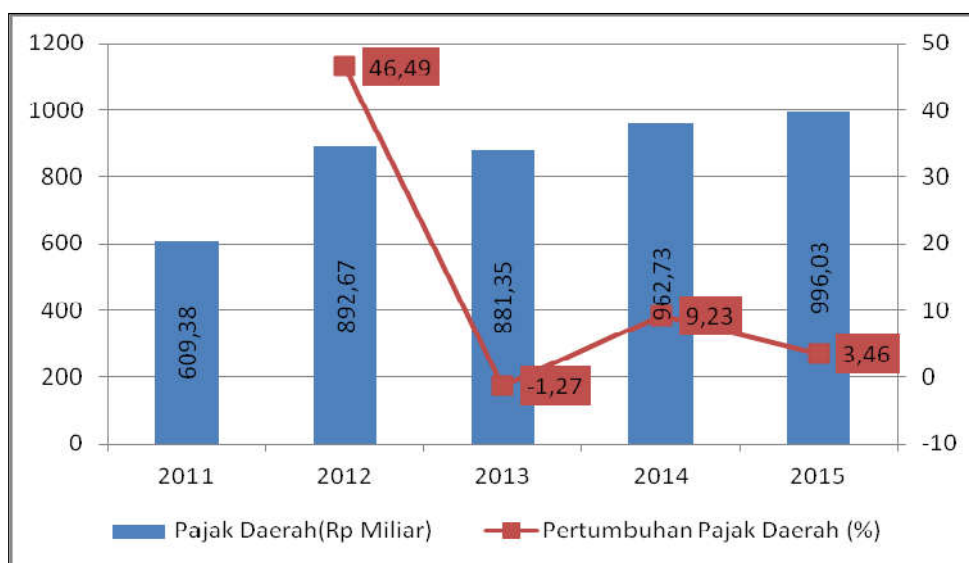
Tabel 2. Rincian Perkembangan Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan

No	Uraian	2011	2012	Jumlah 2013	2014	2015
Pendapatan Pajak Daerah		609,38	892,67	881,35	962,73	996,03
1	Pajak Hotel	58,60	65,86	76,94	82,05	8,26
2	Pajak Restoran	70,67	83,18	93,13	107,53	124,40
3	Pajak Hiburan	16,24	21,59	27,16	30,12	31,16
4	Pajak Reklame	28,00	26,98	23,35	17,71	12,83
5	Pajak Penerangan Jalan	172,67	146,30	167,03	190,55	222,31
6	Pajak Parkir	5,91	6,86	7,45	8,31	12,41
7	Pajak Air	3,07	7,94	8,21	9,07	10,79
8	Pajak BPHTB	254,22	259,11	243,75	228,39	201,81
9	Pajak PBB	0,00	30,79	26,59	30,02	29,92
Pendapatan Retribusi Daerah		236,69	127,84	188,46	171,01	200,16
1	Retribusi Jasa Umum	114,35	33,33	39,69	40,94	49,23
2	Retribusi Jasa Usaha	19,61	14,94	12,52	12,18	7,45
3	Retribusi Perijinan Terpadu	102,73	79,57	136,25	117,89	143,48
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan		11,73	9,78	9,50	5,71	8,52
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	0,15	0,18	0,56	0,00	0,00
2	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan BUMD	11,35	9,26	8,94	5,71	8,52
3	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Swasta	0,23	0,34	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah		137,27	117,61	126,86	244,81	285,01
1	Pendapatan Jasa Giro	15,77	7,15	4,18	9,22	16,96
2	Komisi	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Denda Pajak	1,83	2,04	1,81	2,55	1,09
5	Pendapatan dari Pengembalian	0,95	12,48	11,34	18,18	33,19
6	Fasilitas Sosial	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Penerimaan Lain-lain	4,72	95,94	109,53	214,86	233,77
8	Pendapatan dari kekurangan bagi hasil propinsi	110,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Laporan Realisasi APBD, Badan Pengelola Keuangan Kota Medan (Berbagai tahun) Diolah

Jika di perhatikan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah masih mendominasi dalam penerimaan pendapatan asli daerah di kota Medan bila dibandingkan dengan sumber

penerimaan yang lain yakni pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang masih memberi kontribusi kecil. Besarnya kontribusi laba BUMD terhadap PAD dapat dijadikan indikator kuat atau lemahnya BUMD dalam suatu daerah. Berdasarkan keterangan diatas maka dapat diperoleh sektor-sektor PAD yang perlu dikembangkan adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Selama periode 2011-2015, pajak daerah mengalami pertumbuhan yang melambat, artinya terjadi penurunan yang cukup signifikan sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut ini.



Sumber : Laporan Realisasi APBD, Badan Pengelola Keuangan Kota Medan (Berbagai tahun)
Diolah

Gambar 2. Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2011-2015

Dalam periode tersebut Pajak Daerah mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 14,48%, dengan pertumbuhan terendah pada periode tahun 2013 dengan pertumbuhan negatif sebesar -1,27% dan tertinggi pada periode tahun 2012 sebesar 46,49%.

Berdasarkan tabel 2 di atas maka dapat dihitung besarnya kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap jumlah total penerimaan pajak daerah selama kurun waktu 2011-2015 yang akan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3. Kontribusi Jenis Pajak terhadap Pendapatan Pajak Daerah

No	Uraian	Jumlah					Rata-rata
		2011	2012	2013	2014	2015	
Pendapatan Pajak Daerah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1	Pajak Hotel	9,62	7,38	8,73	8,52	8,26	8,50
2	Pajak Restoran	11,60	9,32	10,57	11,17	12,49	11,03
3	Pajak Hiburan	2,67	2,42	3,08	3,13	3,13	2,88
4	Pajak Reklame	4,59	3,02	2,65	1,84	1,29	2,68
5	Pajak Penerangan Jalan	28,34	16,39	18,95	19,79	22,32	21,16
6	Pajak Parkir	0,97	0,77	0,85	0,86	1,25	0,94
7	Pajak Air	0,50	0,89	0,93	0,94	1,08	0,87
8	Pajak BPHTB	41,72	29,03	27,66	23,72	20,26	28,48
9	Pajak PBB	0,00	30,79	26,59	30,02	29,92	23,46

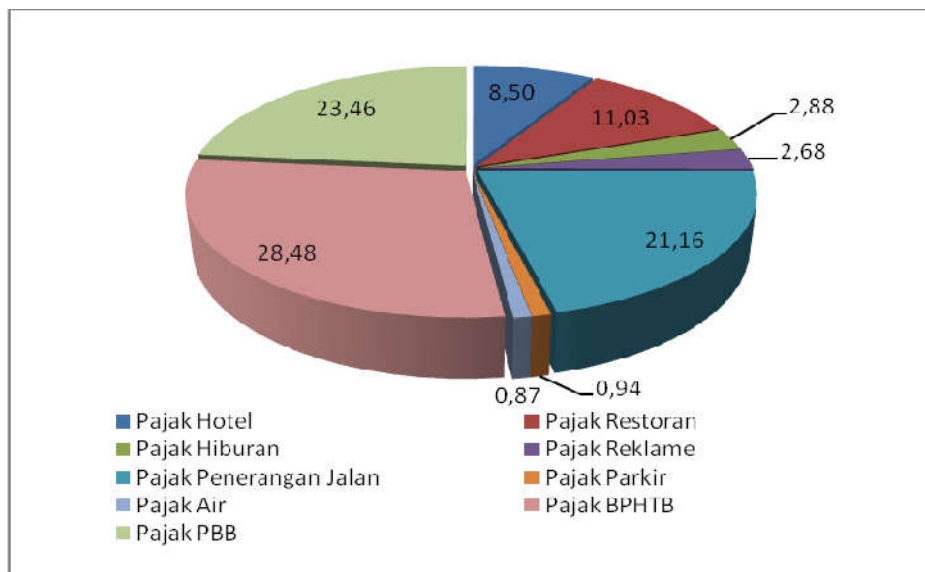
*Sumber : Laporan Realisasi APBD, Badan Pengelola Keuangan Kota Medan (Berbagai tahun)
Diolah*

Terlihat pada tabel di atas rata-rata kontributor terbesar penerimaan pajak daerah di Kota Medan 2011-2015 adalah Pajak BPHTB sebesar 28,48% dengan nilai nominal Rp 246,37 milyar diikuti Pajak PBB sebesar 23,46% dengan nilai nominal Rp 199,55 milyar, kemudian secara berturut-turut Pajak Penerangan Jalan (21,16%), Pajak Restoran (11,03%) dan Hotel (8,5%). Selanjutnya Pajak Hiburan dan Pajak Reklame masing-masing sebesar 2,88% dan 2,68%. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Salomo dan Ikhsan (2002:95) yang menyebutkan bahwa salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan pajak daerah yaitu Pajak Penerangan Jalan. Selanjutnya Salomo dan Ikhsan (2002:96) menjelaskan bahwa jenis-jenis pajak daerah tersebut mempunyai potensi untuk dikembangkan di masa mendatang.

Berdasarkan data tersebut diatas, di Kota Medan jenis pajak daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah pajak BPHTB, Pajak PBB, Pajak Penerangan jalan, Pajak restoran dan Pajak Hotel. Hal ini tentunya sangat berimplikasi pada jenis investasi yang menarik untuk dikembangkan di Kota Medan yaitu potensi investasi di bidang Properti terkait dengan sektor Perumahan yang akan dapat meningkatkan pajak

PBB dan BPHTB, lalu investasi di sektor restoran berikut dengan sektor turunannya berupa investasi kuliner dan investasi di sektor perhotelan.

Agar lebih mudah memahami kontribusi penerimaan setiap jenis pajak daerah terhadap seluruh penerimaan pajak daerah maka penulis juga menyajikan dalam bentuk gambar berikut ini :



Gambar 3. Kontribusi Setiap Jenis Pajak Daerah Terhadap Pajak Daerah

Berdasarkan data tersebut diatas, di Kota Medan jenis pajak daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah pajak BPHTB, Pajak PBB, Pajak Penerangan jalan, Pajak restoran dan Pajak Hotel. Hal ini tentunya sangat berimplikasi pada jenis investasi yang menarik untuk dikembangkan di Kota Medan yaitu potensi investasi di bidang Properti terkait dengan sektor Perumahan yang akan dapat meningkatkan pajak PBB dan BPHTB, lalu investasi di sektor restoran berikut dengan sektor turunannya berupa investasi kuliner dan investasi di sektor perhotelan.

Berdasarkan data dan uraian diatas, selanjutnya dapat dianalisis kinerja pajak daerah yang terdiri dari tiga hal yaitu analisis mengenai upaya pajak (*tax effort*) yang mencakup elastisitas pajak daerah (*tax elasticity*) dan rasio pajak (*tax ratio*), kemudian *tax effectiveness* (hasil guna) serta terakhir adalah *tax efficiency*.

Tax Elasticity (Elastisitas Pajak Daerah)

Analisis elastisitas pajak atau yang sering juga disebut *tax bouyancy* dengan melihat seberapa besar perbandingan persentase perubahan penerimaan pajak daerah dengan persentase perubahan PDRB. Hal ini adalah untuk melihat kepekaan perubahan PDRB tahun depan yang disebabkan perubahan penerimaan pajak daerah tahun sekarang. Agar lebih mudah memahami perhitungannya maka di bawah ini disajikan perhitungannya dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Tax Elasticity

Tahun	Pajak Daerah	PDRB Harga Konstan	Pertumbuhan		Tax Elasticity
	(Rp Milyar)	(Rp Milyar)	(%)		(%)
2011	609,38	97674,56			
2012	892,67	105162,01	46,49	7,67	6,06
2013	881,35	110794,43	-1,27	5,36	-0,24
2014	962,73	117507,60	9,23	6,06	1,52
2015	996,03	124277,41	3,46	5,76	0,60
Rata-rata					1,99

Sumber : Diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata presentase perubahan pajak daerah terhadap presentase perubahan PDRB adalah sebesar 1,99%. Hal ini berarti selama periode 2011-2015, jika pajak daerah tahun sekarang sebesar 1% maka PDRB pada tahun yang akan datang akan meningkat sebesar 1,99%. Angka ini terlihat sangat kecil. Hal ini berarti setiap terdapat perubahan PDRB, maka penerimaan pajak daerah tidak berubah secara signifikan, dengan demikian jika Pemerintah Kota Medan mengambil kebijakan dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak daerah dalam rangka meningkatkan PDRB adalah kebijakan yang kurang tepat. Karena kontribusi PAD terhadap PDRB sangat kecil yaitu rata rata untuk lima tahun terakhir hanya sebesar 0,78%. Namun jika upaya peningkatan pajak daerah adalah dalam rangka meningkatkan PAD adalah tepat, sebab rata-rata kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD cukup signifikan, yaitu sebesar 69,70%. Hal ini cukup penting karena PAD dipandang sebagai ciri kemandirian suatu daerah. Hal ini juga berarti jika upaya peningkatan pajak daerah dalam rangka meningkatkan Penerimaan Asli Daerah, maka hal tersebut merupakan kebijakan yang tepat, sebab rata-rata kontribusi Pajak Daerah terhadap Penerimaan Asli Daerah tahun 2011-2014 cukup signifikan yaitu sebesar 69,70%. Hal ini cukup penting karena Penerimaan Asli Daerah dipandang sebagai ciri kemandirian suatu Daerah.

Tax Ratio (Rasio Pajak)

Selanjutnya Ukuran kinerja perpajakan pada umumnya menggunakan rasio pajak (*tax ratio*), yaitu dengan cara membagi realisasi penerimaan pajak dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Oleh karena itu, terkait dengan rasio pajak, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan jumlah pendapatan potensial yang dapat dikenai pajak. PDRB juga menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang jika berkembang dengan baik merupakan potensi yang baik bagi pengenaan pajak di wilayah tersebut. Mengetahui angka-angka rasio pajak di Kota Medan akan membantu dalam menganalisis secara sederhana hubungan antara pajak daerah Kota Medan dengan PDRB-nya. Dengan Rasio pajak dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayarkan pajak, mengukur kinerja perpajakan, dan melihat potensi pajak yang dimiliki. Sehingga semakin tinggi *tax ratio* suatu daerah menggambarkan semakin tinggi kemandirian suatu daerah. Semakin mandiri suatu daerah berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak yang nantinya akan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Adapun Rasio Pajak Daerah Kota Medan terhadap PDRB ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5. Tax Ratio

Tahun	Pajak Daerah	PDRB Harga Konstan	Pertumbuhan		Tax Ratio
	(Rp Milyar)	(Rp Milyar)	(%)		(%)
2011	609,38	97674,56			0,62
2012	892,67	105162,01	46,49	7,67	0,85
2013	881,35	110794,43	-1,27	5,36	0,80
2014	962,73	117507,60	9,23	6,06	0,82
2015	996,03	124277,41	3,46	5,76	0,80
Rata-rata					0,82

Tax Ratio yang diperoleh Kota Medan dapat dilihat pada tabel di atas. Terlihat pada tabel lima tahun terakhir dari 2011-2015 *tax ratio* yang diperoleh Kota Medan sebagai salah satu ukuran kinerja pajak daerah tidak menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. *Tax ratio* yang ada selama periode 2011-2015 berkisar antara 0,62% sampai 0,85%, dimana *tax ratio* setiap tahunnya hanya sebesar 0,01 atau rata-rata sebesar 0,82%. Hal ini belum menunjukkan upaya pajak daerah (*tax effort*) masih kecil atau belum signifikan. Sebagai patokan, Devas (1983:67) mengatakan bahwa

apabila *tax effort* (upaya pajak) yang diperoleh mencapai 2% maka upaya pajak yang dilakukan adalah baik.

Tax Effectiveness (Hasil Guna Pajak)

Pengukuran efektifitas pajak dilakukan dengan menggunakan Tax Performance Index (TPI). TPI ini Mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi hasil pajak itu sendiri, dengan anggapan semua wajib pajak membayar pajaknya masing-masing. TPI diperoleh dengan membandingkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dengan Rencana Penerimaan Pajak Daerah. Pengukuran efektivitas ini dilakukan dengan data mengenai target penerimaan pajak daerah. Pengukuran efektivitas diperoleh dengan membandingkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dengan Rencana Penerimaan Pajak Daerah yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Berikut ini pengukuran *Tax Performance Index* (TPI), untuk tahun 2011-2015

Tabel 6. Perhitungan *Tax Performance Index*

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Rencana Pajak Daerah	TPI
	(Rp Milyar)	(Rp Milyar)	
2011	609,38	585,03	1,04
2012	892,67	1088,00	0,82
2013	881,35	1190,00	0,74
2014	962,73	1167,40	0,82
2015	996,03	1267,10	0,79
Rata-rata			0,79

Sumber : Diolah

Ratio TPI untuk menghitung tingkat efektifitas berdasarkan tabel perhitungan Tax Performance Index di atas menunjukkan tingkat efektifitas yang cenderung berfluktuasi yang relatif stabil. Tahun 2011 terlihat tingkat efektifitas yang dicapai pada tahun ini adalah sebesar 1,04. Penerimaan Pajak pada tahun itu sebesar nominal Rp 609,38 milyar sedangkan rencana penerimaan sebesar Rp.585,03, pada tahun tersebut penerimaan pajak dapat dikatakan efektif, namun untuk tahun 2012 hingga tahun 2015 TPI mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi tidak efektif, dimana penerimaan pajak daerah pada tahun-tahun tersebut lebih kecil dari rencananya. Sehingga untuk tahun 2012 sampai dengan 2015 Dinas Pendapatan Kota Medan dapat dinyatakan tidak berhasil dalam mencapai target yang direncanakan.

Tax Efficiency (Daya Guna Pajak)

Untuk menghitung efisiensi pajak (daya guna pajak) maka penulis akan sajikan dalam tabel 7. Terlihat pada tabel 7 nilai CCER yang ada sejak Tahun 2011 hingga 2015 berkisar antara 0% hingga 2,15%. Secara rata-rata angka CCER hanya sebesar 0,04%. Angka ini termasuk rendah dan termasuk dalam katagori yang baik, sebab Devas (Salomo dan Ikhsan, 2002:128) mengatakan bahwa bila angka CCER tidak lebih dari 20% berarti masih cukup baik dan dapat dikatakan efisien.

Tabel 7 Tax Efficiency yang di ukur dari Cost of Collection Effeiciency Ratio

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Biaya Pemungutan PD	CCER (%)
	(Rp Milyar)	(Rp Milyar)	
2011	609,38	13,11	2,15
2012	892,67	1,40	0,16
2013	881,35	0,00	0,00
2014	962,73	0,00	0,00
2015	996,03	0,00	0,00
Rata-rata			0,04

Sumber : Diolah

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Secara umum kinerja perpajakan daerah Kota Medan diperoleh gambaran bahwa realisasi PAD dari tahun ketahun mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan PAD untuk tahun 2010-2015 adalah sebesar 22,36%. Dari PAD tersebut pajak daerah dan retribusi daerah masih mendominasi dalam penerimaan pendapatan asli daerah di kota Medan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,48% untuk periode 2011-2015. Kontribusi terbesar terbesar penerimaan pajak daerah di Kota Medan 2011-2015 adalah Pajak BPHTB sebesar 28,48%.

Dilihat dari kinerja pajak daerah, ditunjukkan melalui elastisitas pajak diketahui bahwa rata-rata presentase perubahan pajak daerah terhadap presentase perubahan PDRB adalah sebesar 1,99%, sedangkan dari sisi rasio pajak tidak menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Tax ratio yang ada selama periode 2011-2015 berkisar antara 0,62% sampai 0,85%. Untuk tingkat efektivitas pajak relatif stabil dengan rata ratanya sebesar 0,79 dan jika dilihat dari tingkat efisiensinya sejak Tahun 2011 hingga 2015 berkisar antara 0% hingga 2,15%. Secara rata-rata angka CCER hanya

sebesar 0,04%. Angka ini termasuk rendah dan termasuk dalam katagori yang baik.

Saran

Mencermati perkembangan penerimaan pajak daerah yang cukup besar, seyogyanya Pemerintah Daerah Kota Medan melalui Dinas Pendapatan Daerah agar lebih menggali lagi penerimaan pajak daerah dengan cara melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah dengan cara :

- 1) Memperluas basis penerimaan
- 2) Meningkatkan kinerja fiskus dengan cara melakukan pelaksanaan tahap-tahap administrasi pemungutan pajak dengan benar, melakukan penetapan perencanaan penerimaan yang berdasarkan potensi pajak yang sebenarnya dan meningkatkan efisiensi biaya pemungutan

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Faisal H. *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI, Distorsi, Peluang dan Kendala*. Jakarta : Erlangga 1997.
- Bird, Richard M. & Francois Vaillancourt. *Desentralisasi Fiskal Di Negara-Negara Berkembang*, terjemahan Alimizan Ulfa, Gramedia, Jakarta, 2000
- Cochrane, Glynn. *Policies for Strengthening Government in Developing Countries.*, World Bank Staff Working Papers. No 582. Washington D.C. 1983
- Davey. K.J. *Pembiayaan Pemerintahan : Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*. UI Press, Jakarta, 1988.
- Devas, Nick dkk. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. UI Press. Jakarta.1989
- Dimock, Marshal Edward and Gladys Ogden Dimock. *Administrasi Negara*. Diterjemahkan oleh Husni Thamrin Pane. Cetakan Kelima. Rineka Cipta. Jakarta 1982
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1994
- Effendi, Elfian. *Jangan Menunggu Kapal Pecah, salah urus hutan, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal*. Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 2001

- Handayaniingrat, Soewarno. *Pengantar Study Administrasi Dan Manajemen..* CV Haji Masagung. Jakarta.1990
-*Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Cetakan Kesepuluh. CV Haji Masagung. Jakarta. 1994
- Hidayat, Syarif dan Carunia Mulya Firdausy. *Exploring Indonesian Local State-Elite's orientation towards local autonomy*. Japan International Cooperation Agency. Jakarta, 2002
- Hoessein, Bhenyamin. *Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah*, Jurnal Bisnis dan Birokrasi, Jakarta, Juli 2000.
- Ida, Laode. *Otonomi Daerah, Demokrasi & Clean Government*. PSPK, Jakarta, 2000
- Kasim, Azhar. *Pengukuran Efektivitas Dalam Organisasi*. Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Jakarta. 1993
- Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Kartasasmita, Ginanjar. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta : Cidesindo 1996
- Kelley, Patrick L. and Oliver Oldman. *Income Tax Administration*. The Foundation Press Inc. New York. 1973
- Koswara, E. *Untuk Demokrasi Dan Kemandirian Rakyat*. Yayasan Pariba. Jakarta. 2001
- Koswara, E. *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999. Suatu Telaah menyangkut Kebijaksanaan dan Kompleksitasnya*. Analisis CSIS No.1 Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga. Jakarta. 2003
- Lubis, Hari S.B. dan Martani Huseini. *Teori Organisasi.*, Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Jakarta. 1987
- Mariana, Dede. *Memahami Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Majalah Governance, Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan

Pengembangan Wilayah Lembaga Penelitian Universitas
Padjadjaran Bandung, Juni 2005

Mansyuri, R. *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*. PT Bina
Rena Pariwara. Jakarta. 1994

Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Andi 2002

Musgrave, Richard A. dan Peggy Musgrave. *Keuangan Negara dalam Teori
dan Praktek* (edisi Bahasa Indonesia) Penerbit Erlangga Jakarta 1993

Nordin, Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah
Kabupaten/Kota Di Era Otonomi Daerah. Dalam DELEGASI
Jurnal Ilmu Administrasi No 2 Agustus 2005 STIA Banjarmasin

Prasentiantono, Tony A (ed.) *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia, Substansi
dan Urgensi : Kumpulan Tulisan Dr.Guritno Mangkusubroto*,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994

Pamoedji, S. *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*. Penerbit Ichtiar. Jakarta. 1980

Pattimura, Luthfi. *Manajemen Otonomi Daerah*. LKSPI. Jakarta. 2003

Piliang, Indra J. *Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi. Divisi Kajian
Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa*. Jakarta 2003

Rachbini, Didik.J. *Politik Deregulasi Dan Agenda Kebijakan Ekonomi*. Info
Bank. Jakarta. 1994

Rasyid, Ryas. *Perspektif Otonomi Luas, di dalam Otonomi atau Federalisme,
Dampaknya terhadap Perekonomian*, Suara Pembaruan, Jakarta 2000

Radianto, *Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II Maluku*, Prisma, LP3ES
Jakarta. 1997.

Salomo, Roy V dan M. Ikhsan. *Keuangan Daerah di Indonesia*. STIA LAN
Press Jakarta 2002

Sarundajang. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Sinar Harapan, Jakarta,
1999

Sidik, Machfud, *Keuangan Daerah*. Modul Universitas Terbuka. Penerbit
Universitas Terbuka. Jakarta.1996

Sidik, Machfud. *Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam
Rangka Peningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. disampaikan

dalam Acara Orasi Ilmiah dengan Thema “Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah” Acara Wisuda XXI STIA LAN Bandung Tahun Akademik 2001/2002 - di Bandung, 10 April 2002.

Smith, B.C. *Decentralization : The Territorial Dimension Of The State*. George Allen & Unwin. London. 1985.

Simanjuntak, Robert.A. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal, Kajian Hubungan Keuangan Pusat-Daerah Pasca Orde Baru*, disampaikan sebagai bahan Seminar & Dialog Nasional “Platform Untuk Masa Depan Ekonomi Indonesia”. Diselenggarakan ISEI Cbg Padang dengan IRIS Univ.Marryland serta USAID. Padang, 15-16 April 1999.

Surbakti, Ramlan. *Otonomi Daerah Seluas-luasnya dan Faktor Pendukungnya*. www.otoda.or.id. Tanpa tahun

Soelarno, Slamet. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. STIA LAN Press. Jakarta.1999

Toha, Mahmud dan M. Soekarni. *Studi Kelayakan Ekonomi, Pembentukan Propinsi Baru: Kasus Banten*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Jakarta. 2000

United Nation, *Public Administration in Second United Development Decade*, Departement of Economic and Social Affair, United Nation, New York, 1971

Uppal, J.S. *Taxation in Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2000

Waldo, Dwight. *Pengantar Studi Public Administration*. Terjemahan Selamat W. Admosoedarmo. Cetakan keenam. Radar Jaya Offset. Jakarta.1991

White, Leonard D. *Introduction To The Study Of Public Administration*. Fourth Edition. The Mc Millan Co. New York.1958

Widjaja, A.W. *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*. Jakarta. Rajawali Press, 1998

Zandjani, Tubagus Chairul Amachi. *Perpajakan*. Gramedia. Jakarta. 1992

ANALISIS PEMASARAN JAGUNG DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Rahmanta

Program Studi Agribisnis dan Pascasarjana Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara

Email: rahmanta@usu.ac.id

Abstract

Marketing on corn trends to concentration and distribute where both of commodities produced in many places in raw materials needs, continuity of the commodities processing in the low volume to cover costs in marketing in function . Corn marketing the concentration shorts from gathering the agriculture of product from farmers to gatherers, stock gatherers and by trades and ends in distribution case. It works from agents, retailer to consumer. The study aims to identify how the marketing line of corn and share margin of market on every line of marketing: primer and secondary data got from farmer and corn trader. Analyze Methods are marketing line, marketing major , price spread and share margin. The study research resulted that these are two forms of corn marketing, they are: (a) Farmer – trader – gatherer – farm store or retailer – consumer, (b) Farmer – farm shop or retailer – consumer. Most of the farmers market the on the first line it's about 70% and the rest one is about 30% on the second one. Margin profit received by the traders is bigger than received by the farmers, either on the first marketing line or the second one

Key words : corn price, marketing line, marketing margin, share margin.

PENDAHULUAN

Secara umum pemasaran dianggap sebagai proses aliran barang yang terjadi dalam pasar. Dalam pemasaran ini barang mengalir dari produsen sampai kepada konsumen akhir yang disertai penambahan guna bentuk melalui proses pengolahan, guna tempat melalui proses pengangkutan dan guna waktu melalui proses penyimpanan. Sebagai proses produksi yang komersial maka pemasaran pertanian merupakan syarat mutlak yang diperlukan dalam pembangunan pertanian yang memberikan nilai tambah yang dapat dianggap sebagai kegiatan produktif. Pemasaran pertanian adalah proses aliran komoditi yang disertai perpindahan hak milik dan penciptaan guna waktu, guna tempat, dan guna bentuk yang dilakukan oleh lembaga-

lembaga pemasaran dengan melaksanakan satu atau lebih fungsi-fungsi pemasaran.

Pemasaran komoditi pertanian bersifat konsentrasi dan distributif dimana komoditi tersebut dihasilkan secara terpencar-pencar berupa bahan mentah yang perlu pengolahan lebih lanjut dan dalam jumlah yang relatif sedikit sehingga untuk menutup biaya-biaya yang diperlukan lembaga pemasaran dalam melakukan fungsi-fungsi pemasaran dan memerlukan volume perdagangan yang cukup besar. Pemasaran komoditi pertanian dari proses konsentrasi yaitu pengumpulan produk-produk pertanian dari petani ke tengkulak, pedagang pengumpul dan pedagang besar serta diakhiri proses distribusi yaitu penjualan barang dari pedagang agen, pengecer, dan konsumen.

Sistem pemasaran biasanya berkisar pada kegiatan antara pemasok barang dan jasa, perusahaan, dan pasar. Hubungan ketiga komponen ini biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan kegiatan lain. Hubungan antara pemasok dan perusahaan sangat bergantung pada kesepakatan bisnis antara keduanya. Agar keduanya saling diuntungkan maka biasanya kedua belah pihak membuat kesepakatan jual beli.

Komoditi pertanian memiliki ciri yang khas antara lain produk pertanian adalah musiman, bersifat segar dan mudah rusak, bersifat "*bulky*" artinya volumenya besar tetapi nilainya relatif kecil, lebih mudah terserang hama dan penyakit, tidak selalu mudah didistribusikan ke lain tempat, bersifat lokal atau kondisional, mempunyai kegunaan yang beragam, dan sebagainya. Sehingga terdapat beberapa masalah pemasaran komoditi pertanian yang dihadapi di daerah antara lain : (a) tidak tersedianya komoditi pertanian dalam jumlah yang cukup dan kontinu, (b) fluktuasi harga, (c) pelaksanaan pemasaran yang tidak efisien, (d) tidak memadainya fasilitas pemasaran, (e) terpencarnya lokasi produsen dan konsumen, (f) kurang lengkapnya informasi pasar, (g) kurangnya pengetahuan terhadap pemasaran, (h) kurang responnya produsen terhadap permintaan pasar

Komoditi pertanian yang diperjualbelikan beraneka ragam, lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses pemasaran banyak, satu lembaga pemasaran dapat melakukan satu atau lebih fungsi pemasaran serta adanya kekuatan pembeli dan penjual dalam menentukan harga. Tugas lembaga pemasaran adalah menjalankan fungsi-fungsi pemasaran

serta memenuhi keinginan konsumen semaksimal mungkin. Konsumen memberikan balas jasa kepada lembaga pemasaran ini berupa margin pemasaran.

METODE PENELITIAN

Metode Penentuan Daerah Penelitian

Daerah penelitian dilaksanakan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Daerah penelitian ini dipilih secara sengaja (*purposive*) dengan mempertimbangkan bahwa Kabupaten Labuhanbatu Selatan salah satu daerah yang memiliki potensi dalam pengembangan budidaya tanaman jagung.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu petani dan pedagang jagung, proses pengambilan sampel dari populasinya dinamakan sampling dan bila seluruh populasi diambil dinamakan sensus. Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan.

Sampel adalah bagian dari populasi. Survei sampel adalah suatu prosedur dalam mana hanya sebagian dari populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari populasi.

Besarnya sampel dalam perumusan pemasaran jagung adalah sebanyak 30 orang, hal ini sesuai dengan pendapat Roscoe dalam Sugiyono (2006) ukuran sampel yang layak dalam suatu penelitian minimal sebesar 30 orang. Jumlah anggota sampel ini terdiri dari : (1) petani jagung sebesar 20 orang, (2) pedagang pengumpul atau agen kecil sebesar 5 orang, (3) pedagang besar atau agen besar sebesar 5 orang, (4) pedagang pengecer sebesar 5 orang, sehingga jumlah sampel seluruhnya sebesar 35 orang.

Model Analisis

Secara garis besar, metode pelaksanaan kegiatan meliputi 2 (dua) pendekatan yaitu kuantitatif dan kualitatif. Dalam pendekatan kuantitatif akan dilakukan pengumpulan berbagai data-data pendukung terkait dengan *existing conditions* pemasaran jagung di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Model analisis yang digunakan yaitu *margin pemasaran*, *price spread* dan *share margin* dengan menggunakan rumus :

Untuk margin pemasaran :

$$M_{ji} = P_{si} - P_{bi}$$

$$M_{ji} = b_{ti} + \mu_i$$

$$\mu_i = m_{ji} - b_{ti}$$

Sehingga margin pemasaran total adalah

$$M_j = \sum m_{ji}$$

Dimana :

M_{ji} = Margin pada lembaga pemasaran ke-i

P_{si} = Harga penjualan pada lembaga pemasaran ke-i

P_{bi} = Harga pembelian lembaga pemasaran ke-i

b_{ti} = Biaya pemasaran lembaga pemasaran ke-i

μ_i = Keuntungan lembaga pemasaran

M_j = Margin pemasaran total

$i = 1, 2, 3, \dots, n$

Untuk menghitung *share margin* :

$$\frac{P_p}{P_k}$$

$$S_m = \left(\frac{P_p}{P_k} \right) \times 100\%$$

$$\frac{P_p}{P_k}$$

Dimana

S_m = *Share margin*

P_p = Harga yang diterima dari produsen

P_k = Harga yang dibayar oleh konsumen akhir

Untuk *Price spread* diperoleh dengan mengelompokkan biaya-biaya tata niaga yang dikeluarkan oleh setiap lembaga pemasaran dari setiap saluran pemasaran yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saluran Pemasaran Jagung

Sistem pemasaran jagung di daerah penelitian terdiri atas 3 sub sistem, yang saling berkaitan, yaitu :

(a) Produsen/Petani Jagung, (b) Pedagang perantara meliputi pedagang pengumpul dan pedagang pengecer/toko tani, (c) Konsumen, yaitu mereka yang membeli jagung dari pedagang perantara untuk di konsumsi

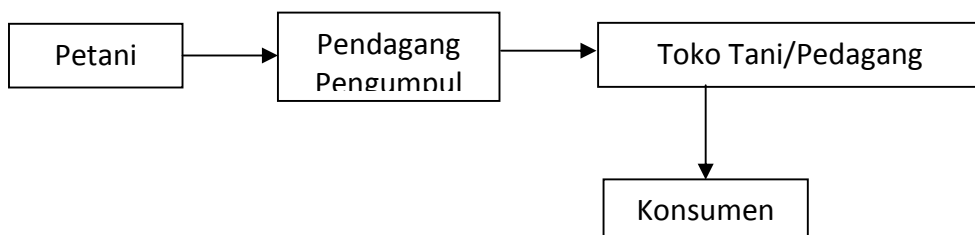
Keseluruhan sistem ini memiliki tujuan yang sama yakni mendistribusikan jagung dari lahan pertanian sampai ke tangan konsumen, sehingga dalam pergerakan sub sistem ini terbentuklah saluran pemasaran. Untuk mendistribusikan jagung sampai ketangan konsumen setiap lembaga pemasaran melakukan fungsi pemasaran dan menimbulkan biaya pemasaran.

Produsen (petani jagung) melakukan kegiatan pembelian input-input produksi, penanaman, pemeliharaan jagung hingga ke pemanen. Harga jagung yang di jual petani ke pedagang perantara bfluktuasi tergantung pada tinggi rendahnya kadar air jagung. Makin rendah kadar air jagung maka harga jual akan semakin tinggi pula.

Di Kecamatan Torgamba hasil panen jagung terlebih dahulu dipipil oleh petani sendiri, kemudian di jual ke pada pedagang pengumpul atau langsung ke toko tani, dari toko tani di jual langsung kepada konsumen.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan terdapat 2 jenis saluran pemasaran jagung di daerah penelitian. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

a) Saluran Pemasaran Jagung I

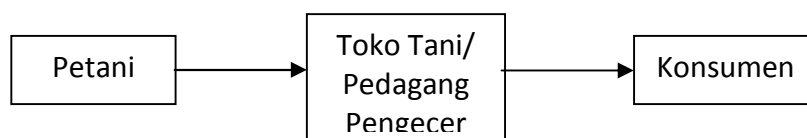


Gambar 1. Saluran Pemasaran Jagung I

Pada saluran pemasaran pertama, petani terlebih dahulu memipil jagung hasil panennya. Kemudian petani menjual jagung pipilan kering ini ke pedagang pengumpul. Dari pedagang pengumpul jagung pipil ini di jual langsung ke Toko Tani (Toko Bintang Tani) yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau Kota Pinang. Toko Tani (Bintang Tani) sebagai pedagang pengecer. Pedagang pengecer menjual langsung kepada konsumen untuk pakan ternak. Untuk mengetahui biaya dari masing-masing lembaga pemasaran, dapat dilihat berdasarkan saluran pemasaran jagung yang ada.

Umumnya petani tidak menjual Jagung pipilan langsung ke toko tani karena alat transportasi yang terbatas, pedagang pengumpul yang biasanya membeli jagung dari petani dengan alasan agar meminimalisir atau mengurangi biaya.

Saluran Pemasaran Jagung II



Gambar 2. Saluran Pemasaran Jagung II

Dari gambar di atas diketahui pada saluran pemasaran jagung ke II petani langsung membawa jagung pipilan langsung ke toko tani (Bintang tani) berbeda dengan saluran I yang menjual jagung pipilannya ke pada pedagang pengumpul terlebih dahulu. pada saluran ini petani langsung menjual pada toko, karena petani memiliki keuntungan lebih besar bila menjual langsung ke toko tani dari pada melalui pedagang pengumpul.

Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar petani memasarkan jagungnya pada bentuk saluran pemasaran II, yaitu sekitar 70 persen, dan sisanya sebesar 30 persen lagi petani memasarkan jagung pada bentuk saluran pemasaran I. Bentuk saluran II ini lebih pendek dari pada saluran pemasaran I sehingga dapat menghemat biaya saluran pemasaran jagung dan pada akhirnya dapat meningkatkan harga jual petani dan pendapatan yang diterima oleh petani jagung.

Biaya Pemasaran, *Price Spread* dan *Share Margin* pada Setiap Saluran Pemasaran Jagung

Untuk menganalisis *price spread* dan *margin* pemasaran di setiap saluran pemasaran jagung maka perlu dihitung biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga pemasaran. Untuk mengetahui biaya dari masing-masing petani dan lembaga pemasaran dapat dilihat berdasarkan saluran pemasaran jagung yang ada.

a) Petani - Pedagang Pengumpul - Toko Tani/Pedagang Pengecer - Konsumen

Dari setiap periode panen pedagang pengumpul membeli jagung dari petani sekitar 200 kg - 300 kg dalam bentuk jagung pipilan. Dengan rata-rata pembelian 250 kg, harga beli pedagang pengumpul ke petani bervariasi tergantung oleh kadar air jagung. Rata-rata harga beli jagung dari pedagang pengumpul ke petani adalah Rp. 4100/kg.

Pedagang pengumpul menjual jagung pipilan tersebut ke toko tani. Harga jual pedagang pengumpul ke toko tani bervariasi tergantung kadar air jagung tersebut dengan harga jual rata-rata Rp. 4500/kg.

Biaya pemasaran yang di tanggung oleh pedagang pengumpul terdiri dari biaya transportasi dan upah bongkar muat sebesar Rp. 150/kg, biaya yang dikeluarkan hanya transportasi dan upah bongkar muat di karenakan dekatnya jarak dari desa ke toko tani. Keuntungan yang di peroleh pedagang pengumpul dalam penjualan jagung pipilan adalah Rp. 250/kg.

Dari pedagang pengumpul, jagung tersebut di jual kepada toko tani (pedagang pengecer), dan toko tani (pedagang pengecer) menjual jagung pipilan tersebut ke konsumen dengan harga rata-rata Rp. 6000/kg dan keuntungan yang di peroleh toko tani (pedagang pengecer) rata-rata sebesar Rp. 1400/kg.

Dari uraian diatas dapat dibuat biaya pemasaran, *price spread*, *share margin* dan profit margin per kg jagung pada saluran pemasaran tersebut sebagai berikut:

Tabel 1. Komponen biaya, Price Spread, dan Share Margin Jagung Pipil Kering per Kg Saluran I

No	Uraian	Nilai/Price (Rp/Kg)	Spread	Share (%)	Margin
1	Tingkat Petani				
	a) Biaya Produksi	3500		58,33	
	b) Profit Margin	600		0,10	
	c) Harga Jual	4100		68,33	
2	Tingkat Pedagang Pengumpul				
	a) Harga Beli Jagung	4100		68,33	
	b) Biaya Pemasaran				
	- Transportasi	50		0,83	
	- Tenaga Kerja	100		1,67	
	c) Profit Margin	250		4,17	
	d) Harga Jual	4500		75,00	
3	Tingkat Toko Tani				
	a) Harga Beli	4500		75,00	
	b) Biaya Pemasaran				
	- Sewa Tempat	50		0,83	
	- Packing	50		0,83	
	c) Profit Margin	1400		23,33	
	d) Harga Jual	6000		100,00	
4	Harga Beli Konsumen	6000		100,00	

Sumber : Analisis Data Primer 2016

b) Petani – Toko Tani/Pedagang Pengecer

Selanjutnya rincian mengenai biaya pemasaran, price spread dan share margin untuk saluran pemasaran jagung ke II dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Komponen Biaya, Price Spread, dan Share Margin Jagung Pipil Kering per Kg Saluran II

No	Uraian	Nilai/Price (Rp/Kg)	Spread	Share (%)	Margin
1	Tingkat Petani				
	a) Biaya Produksi	3500		58,33	
	b) Biaya Transportasi	100		1,67	
	c) Biaya Tenaga Kerja	100		1,67	

	d) Profit Margin	800	13,33
	e) Harga Jual	4500	75,00
2	Tingkat Toko Tani		
	a) Harga Beli	4500	75,00
	b) Biaya Pemasaran		
	- Sewa Tempat	50	0,83
	- Packing	50	0,83
	c) Profit Margin	1400	23,33
	d) Harga Jual	6000	100,00
3	Harga Beli Konsumen	6000	100,00

Sumber : Analisis Data Primer 2016

Rata-rata harga jual jagung dari petani ke toko tani adalah Rp. 4500/kg dimana biaya pemasaran yang di tanggung oleh petani terdiri dari biaya transportasi dan biaya tenaga kerja atau upah bongkar muat sebesar Rp. 200/kg, dan keuntungan yang diperoleh petani dalam penjualan jagung pipilan adalah Rp. 800/kg. Dari toko tani (pedagang pengecer) menjual jagung pipilan tersebut ke konsumen dengan harga rata-rata Rp. 6000/kg, dan keuntungan yang di peroleh toko tani (pedagang pengecer) rata-rata sebesar Rp. 1400/kg.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 2 (dua) bentuk saluran pemasaran jagung, yaitu: (a) Saluran I : Petani – Pedagang Pengumpul – Toko Tani atau Pedagang Pengecer – Konsumen, (b) Saluran II : Petani – Toko Tani atau Pedagang Pengecer – Konsumen.
- Sebagian besar petani memasarkan jagungnya pada bentuk saluran pemasaran II, yaitu sekitar 70 persen, dan sisanya sebesar 30 persen lagi petani memasarkan jagung pada bentuk saluran pemasaran I.
- Saluran pemasaran I dan II dimana profit margin yang diterima oleh pedagang lebih besar daripada yang diterima petani.

- d) Sektor pertanian, khususnya tanaman jagung di daerah penelitian saat ini masih merupakan sebagai sumber penghasilan atau penyedia lapangan pekerjaan sebagian besar penduduk.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan maka dapat disarankan adalah sebagai berikut :

- a) Kepada pemerintah agar lebih memperhatikan sektor pertanian khususnya tanaman pangan karena sebagian besar penduduknya masih menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut, dengan cara kebijakan membangun sarana dan prasarana yang berkaitan dengan sektor pertanian.
- b) Perlu adanya pengolahan bahan baku dari hasil pertanian lebih lanjut, seperti pengolahan biji jagung menjadi jagung pipilan, dengan kebijakan bantuan mesin pengolahan hasil pertanian ke petani dalam rangka meningkatkan nilai tambah dari produk olahan tersebut.
- c) Meningkatkan efisiensi saluran pemasaran pertanian dengan cara kebijakan mengurangi stakeholders yang terlibat dalam pemasaran hasil pertanian dalam rangka meningkatkan harga jual dan pendapatan petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Assauri, Sofjan. 2007. *Manajemen Pemasaran*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Basu Swasta dan T. Hani Handoko, William J. Stanton. 2004. *Management Pemasaran Modern*. PT. Grasindo Persada. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2016. *Labuhanbatu Selatan Dalam Angka 2016*. Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kota Pinang.
- Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian. 2001. *Kebijakan dan Program Pembangunan Pemasaran Hasil Pertanian 2001-2004*. Departemen Pertanian RI, Jakarta.
- Kotler, P. 2005. *Manajemen Pemasaran, Jilid 1 dan 2*. PT. Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta.

- Krisnamurthi, B. 2014. *Kebijakan untuk Petani : Pemberdayaan untuk Pertumbuhan dan Pertumbuhan yang Memberdayakan*. Disampaikan pada Pembukaan Konferensi Nasional XVII dan Kongres Nasional XVI Perhepi, Bogor.
- Rangkuti, F. 1997. *Riset Pemasaran*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Rahmat Rukmana. 1997. *Usaha Tani Jagung*. Penerbit Kanisius. Jogjakarta
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Bandung.
- Soekartawi. 2006. *Analisis Usahatani*. UI Press. Jakarta.

ANALISIS KESEIMBANGAN TINGKAT SUKU BUNGA DAN GDP DI INDONESIA : TINJAUAN INTERAKSI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER (1998 – 2011)

Vietha Devia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: vietha.devia@gmail.com

Abstract

The aim of this study is to see how the equilibrium (internal balance) of interest rate and GDP created by the goods market (IS curve) and money market (LM). Then from the earlier internal balance, the study want to see how the fiscal and monetary policy affects the economy, particularly in influencing the internal balance when the two policies were interacted. The study was conducted with Two Stage Least Square (TSLS) method to finding IS – LM equation using time series data (1998 – 2011). Then do the trial and error to find an internal balance. After that the authors try to find the shift of IS – LM when there were policy intervention. The result showed that the earlier of internal balance is 7,79% for interest rate, and Rp. 438.011 billion for GDP. Based on estimation of time series data, the study concluded that, there is no equilibrium for internal balance when fiscal and monetary policy were interacted. When there is fiscal policy intervention, the result show that the policy effectively affect economic growth. While when there is monetary policy intervention, the result show that the economy not responsive to the policy. So when the fiscal and monetary policy were interacted, it can not be created the new equilibrium (internal balance).

Key words : Fiscal Policy, Monetary Policy, Fiscal and Monetary Policy Interaction, TSLS

PENDAHULUAN

Produkt Domestik Bruto (GDP) atau Produk Nasional Bruto dan GNP umumnya digunakan sebagai indikator utama dalam perekonomian suatu negara. GDP adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun.

Sedangkan GNP adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk suatu negara baik di dalam negeri dan di luar negeri (Arsyad, 2002).

Mahzab dalam teori ekonomi dijadikan konsep untuk menjalankan sistem perekonomian agar roda perekonomian dapat berjalan dengan baik. Dua teori aliran ekonomi yang sering digunakan diantaranya adalah aliran ekonomi klasik dan keynesian. Pada dasarnya kedua aliran ini saling bertolak belakang.

Konsep *Laissez Faire* pada aliran klasik merupakan pioneer dalam sistem perekonomian liberal. Dalam aliran klasik dinyatakan bahwa perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian dibatasi seminimal mungkin dalam aliran klasik. Keynesian menyatakan bahwa konsep *Laissez Faire* tidak bisa diterapkan. Pada dasarnya, teori Keynesian muncul ketika pada tahun 1937 terjadi krisis ekonomi yang dialami Eropa. Pada masa itu, perekonomian Eropa mengalami depresi, meningkatnya pengangguran, dan menurunnya pendapatan hingga merosotnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, munculnya teori Keynesian dianggap sebagai jawaban yang tepat ketika krisis ekonomi muncul. Keynes menyatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil diperlukan intervensi pemerintah berupa kebijakan.

Kondisi perekonomian Indonesia tergolong sebagai perekonomian terbuka kecil, dimana aktivitas perekonomian dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian dunia. Sebagai contoh, tingkat bunga dalam negeri mengikuti perkembangan tingkat suku bunga dunia. Dalam kondisi perekonomian terbuka, aliran barang dan modal bebas berjalan masuk atau keluar dalam suatu negara baik berupa kegiatan ekspor atau impor, investasi, kerjasama suatu program ataupun dalam bentuk pengiriman tenaga kerja. Oleh karena itu, jika terjadi guncangan atau *economic shocks* pada perekonomian dunia, Indonesia rentan terkena dampaknya.

Kebijakan berjalan terkait dengan fundamental perekonomian. Pada kondisi tertentu, contoh ketika krisis, umumnya pemerintah sebagai otoritas fiskal merasa perlu untuk membuat kebijakan fiskal, khususnya kebijakan yang ekspansif. Kebijakan ekspansif pada dasarnya mempunyai dua tujuan pokok. Pertama guna melindungi hilangnya daya beli (*purchasing power*) pada masyarakat terutama masyarakat lemah karena inflasi atau kenaikan harga berbagai komoditi terutama makanan atau barang kebutuhan pokok dan energi (bahan bakar). Tujuan yang kedua

adalah untuk mengatasi dampak buruk pada *aggregate demand* karena penurunan ekspor dan investasi (Hasan dan Isgut, 2009).

Di sisi lain, Bank Sentral sebagai otoritas moneter bertugas untuk menetapkan kebijakan moneter, yang pada dasarnya ditujukan untuk mengendalikan inflasi. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus (Sudarjah dan Anwar, 2008). Instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk mengendalikan tingkat inflasi biasanya melalui tingkat suku bunga dan *base money*. Otoritas fiskal dan otoritas moneter seharusnya berkoordinasi dalam menetapkan kebijakan fiskal dan moneter. Adanya koordinasi fiskal dan moneter, diharapkan sisi moneter maupun sektor riil mempunyai fundamental yang kuat. Dengan demikian upaya memperkuat fundamental perekonomian bisa lebih efektif.

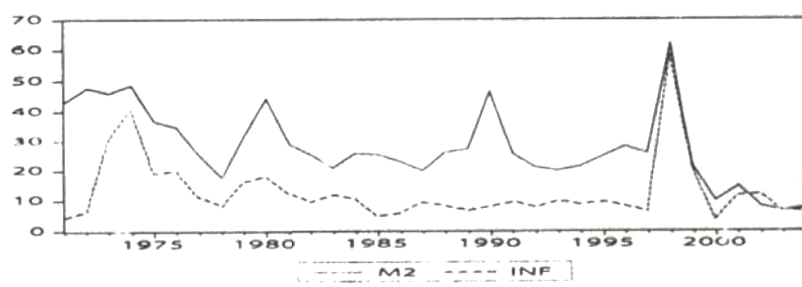
Mix policy (fiskal dan moneter) diambil dan diatur sedemikian rupa dalam rangka menciptakan stabilisasi perekonomian untuk menghasilkan pendapatan dan tingkat suku bunga yang stabil dalam menciptakan inflasi. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Dornbusch dan Fischer (1988); " Kebijakan stabilisasi adalah kebijakan moneter dan fiskal yang dirancang untuk memperlunak fluktuasi perekonomian khususnya, fluktuasi pada laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran". Salah satu contoh kebijakan stabilisasi (mix policy) untuk mencapai pendapatan (GDP) yang tinggi dan tingkat suku bunga yang stabil pernah dilakukan oleh Amerika Serikat. Pada tahun 60 an, Amerika Serikat mengalami resesi dengan GDP yang rendah. Kemudian Pemerintah mengambil suatu kebijakan fiskal berupa pemotongan pajak. Hasil dari kebijakan fiskal yang ekspansif tampak jelas dari pertumbuhan riil yang tinggi. Di sisi lain, kebijakan moneter juga diambil sebagai *accomodating policy* untuk menjaga suku bunga agar tetap konstan.

Pertumbuhan yang tinggi dan tingkat suku bunga yang stabil merupakan indikator pokok dalam setiap negara yang berusaha dicapai. Dua indikator berupa pendapatan dan tingkat suku bunga lazim disebut sebagai ekuilibrium makroekonomi. Menurut Dornbusch dan Fischer (1998), ketika tercapai ekuilibrium, pada pasar barang terjadi permintaan barang yang sama dengan output, dimana tercermin pada kurva IS dan pada pasar uang juga terjadi permintaan uang yang sama dengan penawaran uang, yang tercermin dalam kurva LM. Sehingga dalam kondisi ekuilibrium,

perusahaan akan memproduksi output sesuai dengan yang direncanakan, tidak ada penimbunan barang dan individu di pasar uang mempunyai komposisi investasi yang diinginkan.

Realita di Indonesia tampaknya keseimbangan ekonomi belum tercipta dengan baik dan cenderung berfluktuasi. Di Indonesia, sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk menggerakkan pasar barang dan pasar uang dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi belum tercipta dengan baik. Bahkan antara keduanya terdapat hubungan yang bertentangan. Atau dengan kata lain di Indonesia selalu tercipta disequilibrium antara GDP dan tingkat suku bunga. Goeltom (2007) menyatakan bahwa debat mengenai hubungan otoritas fiskal dan moneter berfokus pada inflasi, yang menimbulkan konsekuensi bahwa bank sentral membiayai defisit fiskal pemerintah yang dapat mengakibatkan hiperinflasi dan membawa ekonomi pada resesi seperti yang pernah dialami oleh Indonesia pada tahun 1960.

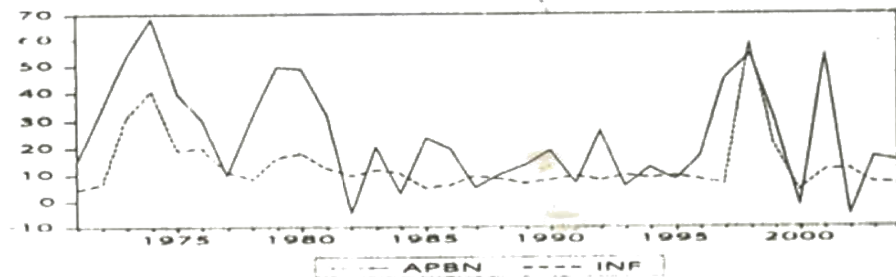
Data-data yang tercatat pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa ketika pemerintah mengambil kebijakan fiskal berupa defisit fiskal ataupun peningkatan pengeluaran pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, hal yang terjadi adalah meningkatnya inflasi di sisi moneter, sebagai dampak pengambilan *accomodating policy* oleh otoritas moneter berupa untuk pembiayaan defisit fiskal pemerintah. Menurut Goeltom (2007), setiap pengeluaran pemerintah akan *direcord* di NCG (net claim on government). Kenaikan pengeluaran pemerintah berarti kenaikan dalam NCG, dan kenaikan dalam NCG akan memicu ekspansi dalam money creation yang meningkatkan base money (M1 dan M2). Pada akhirnya, kenaikan *base money* akan mengakibatkan inflasi seperti gambar berikut:



Sumber: Bank Indonesia dikutip dari Goeltom (2007)

Gambar 1: Money Supply dan Inflasi

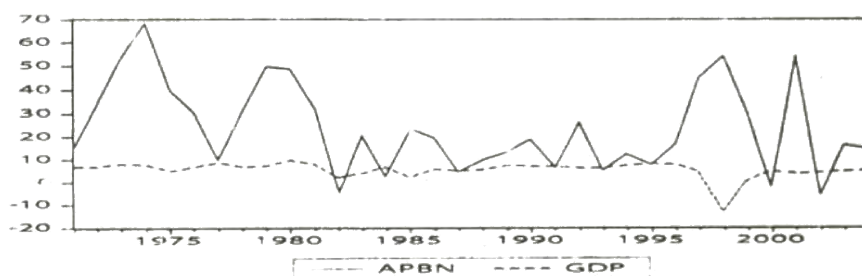
Hubungan antara kebijakan fiskal ekspansif dan inflasi adalah berkorelasi positif. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kebijakan fiskal ekspansif dapat memicu inflasi di sisi moneter. Korelasi kebijakan fiskal dan inflasi dapat dilihat pada gambar 2:



Sumber: Bank Indonesia dikutip dari Goeltom (2007)

Gambar 2: Kebijakan Fiskal dan Inflasi

Pada akhirnya, kebijakan fiskal yang ekspansif yang meningkatkan inflasi mendorong otoritas moneter untuk mengambil kebijakan berupa peningkatan suku bunga yang mengakibatkan GDP tidak dapat terdorong untuk naik. Gambar 3 menunjukkan hubungan antara kebijakan fiskal ekspansif dengan GDP.



Sumber: Bank Indonesia dikutip dari Goeltom (2007)

Gambar 3: APBN dan GDP

Menurut Goeltom (2007), beberapa ekonom memandang bahwa koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan berdampak baik pada stabilitas makroekonomi. Sejalan dengan hasil penelitian Freedman et al (2009) (Simorangkir dan Adamanti, 2010), dikatakan bahwa kebijakan fiskal ekspansif yang diakomodatif oleh kebijakan moneter memiliki efek multiplier yang signifikan pada perekonomian dunia. Tetapi realitanya di Indonesia, mix policy guna menciptakan stabilitas makroekonomi masih

sulit untuk dilakukan. Terutama untuk mengatasi *trade off* antara kenaikan GDP dan inflasi. Sehingga yang terjadi adalah disequilibrium antara GDP dan tingkat suku bunga. Oleh karena itu, studi ini mencoba untuk menganalisa keseimbangan makroekonomi di Indonesia, dimana tercipta GDP (Y) dan tingkat suku bunga (r) yang optimal ketika kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan moneter sebagai *accomodating policy* dijalankan secara beriringan.

Lebih lanjut penulis akan mencoba melakukan simulasi. Skenario pertama adalah ketika Pemerintah menambah stimulus fiskal berupa peningkatan pengeluaran pemerintah. Skenario kedua, ketika BI menjalankan kebijakan moneter ekspansif. Dari kondisi tersebut dapat dilihat seberapa besar stimulus fiskal beserta kebijakan moneter yang dibutuhkan untuk mengurangi fluktuasi dan dampaknya terhadap perekonomian.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan positivism. Studi ini menggunakan metode kuantitatif karena ingin mengetahui pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain. Selain itu, terdapat permasalahan akibat ketidaksesuaian antara teori dan praktek, dengan kata lain terhadap *gap*. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010), metode kuantitatif digunakan apabila ada masalah yang sudah jelas. Masalah yang terjadi merupakan penyimpangan antara teori dan praktek, antara rencana dan pelaksanaan.

Untuk pendekatan penelitian menggunakan positivism dikarenakan penelitian berawal dari teori, kemudian dari teori tersebut diturunkan menjadi model dan menguji model tersebut secara empiris. Menurut Neuman dalam Martono (2010), pendekatan positivism lahir dari cara pandang ilmu alam dalam melihat objek pengamatannya dan fenomena sosial yang terjadi merupakan suatu wujud hubungan sebab akibat. Berawal dari teori mengenai kebijakan fiskal dan moneter yang saling berhubungan dan bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, penulis menurunkannya menjadi model dan mengujinya secara empiris.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan adalah data kuartalan tahun 1998 sampai 2010. Penelitian ini memilih tahun 1998-2011 karena pada rentang waktu tersebut, terjadi dua peristiwa

berupa *economic shock* yaitu krisis Asia 1998 dan krisis global 2008. Sehingga pada tahun 1998-2011, kita dapat melihat bagaimana kebijakan fiskal dan moneter berinteraksi dalam menciptakan stabilitas makroekonomi.

Dalam penelitian ini akan digunakan alat analisis kuantitatif untuk data time series yakni dengan model persamaan sistem simultan. Penulis menggunakan model persamaan sistem simultan karena pada sistem persamaan yang diestimasi terdapat variabel tak bebas yang dapat muncul lagi sebagai variabel bebas dalam persamaan lain dari sistem. Model yang diestimasi mengacu pada model Mundel-Flemming yang secara matematis ditulis sebagai berikut:

$$\ln Y_d = \alpha_1 \ln e + \alpha_2 \ln G - \alpha_3 r_d + \alpha_4 \ln Y_t \dots\dots\dots(1)$$

$$\ln M_o = \alpha_5 \frac{\ln e}{\ln e^*} + \alpha_6 \ln Y_d - \alpha_7 r_d \dots\dots\dots(2)$$

dimana:

Y_d = output domestik (GDP riil)

e = kurs riil

e^* = kurs nominal

G = pengeluaran pemerintah

r_d = suku bunga dalam negeri

Y_t = net ekspor

M_o = money supply

Jika masing-masing persamaan IS dan LM sudah diestimasi, maka dapat dibentuk persamaan dari kurva IS dan LM. Kemudian persamaan IS dan LM dilakukan *trial and error* untuk mencari Y dan r keseimbangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi data menunjukkan hasil pada tabel 1. Pengujian secara parsial variabel kurs riil ($\ln e$) terhadap GDP ($\ln Y_d$), diperoleh t-statistic sebesar 3.424 dan Prob (t) sebesar 0.001. Karena nilai Prob < 0.05, mengindikasikan kurs riil ($\ln e$) signifikan mempengaruhi GDP ($\ln Y_d$).

Signifikannya kurs mempengaruhi GDP sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Mankiw, bahwa kurs riil dapat mempengaruhi GDP

melalui neraca perdagangan. Jika kurs mengalami depresiasi, maka harga barang domestik di pasaran internasional menjadi lebih murah. Sehingga ekspor dapat meningkat dan meningkatkan GDP. Penelitian yang sama juga pernah dilakukan oleh Debele dan Galati (2005). Debele dan Galati (2005) meneliti pengaruh nilai tukar terhadap perekonomian dengan studi kasus negara US. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perubahan dalam nilai tukar mata uang suatu negara akan menyebabkan perubahan dalam pertumbuhan outputnya (Mukhlis, 2010).

Pada studi kasus yang dilakukan penulis, kasus di Indonesia menggambarkan efektifnya jalur mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur nilai tukar. Menurut Goletom (2007), kebijakan moneter dapat mempengaruhi perekonomian melalui *exchange rate system* dimana pengaruh nilai tukar dapat mempengaruhi melalui aggregate demand dan aggregate supply. Hingga pada akhirnya dapat mempengaruhi harga dan output secara nasional.

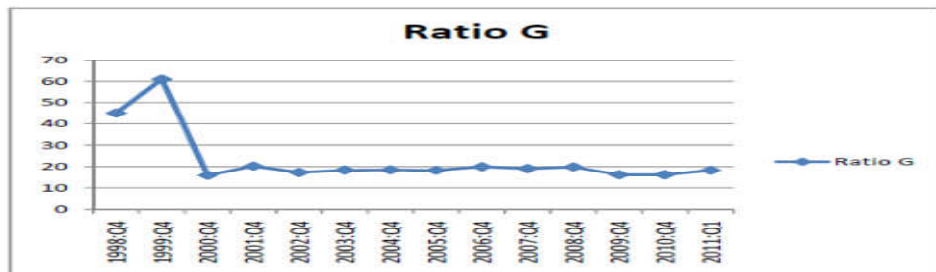
Tabel 1:Hasil dan Pembahasan

Persamaan 1: Variabel Endogen Ln Yd				
Variabel	Koefisien	t-statistic	Prob (t)	Keterangan
Konstanta	-9.690			
Ln e	1.012	3.424	0.001	Signifikan
Ln G	0.674	7.241	0.000	Signifikan
Rd	-0.001	-0.742	0.462	Tidak Signifikan
Ln Yt	-0.111	-1.086	0.284	Tidak Signifikan
R-square = 70.38%				
F-statistic = 25.551				
Prob (F) = 0.000				
Persamaan 2: Variabel Endogen Ln M				
Variabel	Koefisien	t-statistic	Prob (t)	Keterangan
Konstanta	11.345			
Ln e ₁	-6.507	-3.447	0.001	Signifikan
Ln Yd	0.786	8.099	0.000	Signifikan
Rd	0.003	2.135	0.038	Signifikan
R-square = 64.30%				
F-statistic = 34.186				
Prob (F) = 0.000				

Pengujian secara parsial variabel *Government Expenditure* (Ln G) terhadap GDP (Ln Yd), diperoleh t-statistic sebesar 7.241 dan Prob (t) sebesar 0.000. Karena nilai Prob < 0.05, mengindikasikan *Government Expenditure* (Ln G) signifikan mempengaruhi GDP (Ln Yd).

Kebijakan pemerintah untuk menetapkan kebijakan fiskal ekspansif tampaknya tidak sia-sia. Menurut Madjid (2007), ketika faktor-faktor lain cenderung menurun perannya dan sektor investasi juga masih relatif kecil perekonomian sangat tergantung pada pengeluaran pemerintah. Bahkan

pengalaman di negara-negara maju, pengeluaran publik menyebabkan kenaikan GDP secara proporsional (Assery, 2009). Berikut proporsi belanja pemerintah dalam pembentukan GDP:



Gambar 6. Ratio G terhadap GDP

Berkaitan dengan krisis global yang terjadi, Pemerintah mengambil kebijakan berupa paket kebijakan stimulus fiskal. Pada tahun 2009, Pemerintah mengambil kebijakan stimulus fiskal dengan realisasi anggaran sebesar 1,4% dari GDP (Depkeu, 2009). Paket kebijakan stimulus fiskal tersebut terdiri dari pemotongan pajak, peningkatan belanja negara terutama dalam pemberian subsidi serta belanja infrastruktur. Pada 2010, paket kebijakan stimulus fiskal hanya di bawah 1% (Abimanyu, 2009). Kebijakan tersebut terdiri dari penurunan pajak penghasilan badan dan pajak perusahaan.

Pengujian secara parsial variabel SBI (rd) terhadap GDP (ln Yd), diperoleh t-statistic sebesar -0.742 dan Prob (t) sebesar 0.462. Karena nilai Prob > 0.05, mengindikasikan bahwa SBI (rd) tidak signifikan mempengaruhi GDP (ln Yd). Hal ini disebabkan bahwa yang menjadi tolak ukur untuk meningkatkan GDP adalah investasi di sektor riil yang pada prinsipnya membutuhkan biaya yang rendah.

Hubungan antara investasi dan tingkat suku bunga diungkapkan oleh Boediono dalam Purnomo (2003), investasi merupakan fungsi dari tingkat suku bunga, tetapi hubungannya negatif. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat suku bunga, maka yang semakin tinggi adalah saving dan akan menurunkan permintaan dana pinjaman sebagai modal. Pada akhirnya investasi untuk dunia usaha atau penyaluran di sektor riil akan semakin tidak bergairah.

Pengalaman buruk terjadi ketika krisis tahun 1997. Ketika itu, tingkat suku bunga membumbung tinggi akibat tekanan inflasi. Banyak terjadi gagal

bayar dari para debitur. Selain itu dari sisi perbankan itu sendiri, terjadi keengganan untuk menyalurkan kredit akibat banyak terjadinya gagal bayar. Menurut Kurniawan (2004), pada 1997 otoritas moneter menaikkan suku bunga yang semula 7 % menjadi 30 %.

Pengalaman buruk terjadi ketika krisis tahun 1997. Ketika itu, tingkat suku bunga membumbung tinggi akibat tekanan inflasi. Banyak terjadi gagal bayar dari para debitur. Selain itu dari sisi perbankan itu sendiri, terjadi keengganan untuk menyalurkan kredit akibat banyak terjadinya gagal bayar. Menurut Kurniawan (2004), pada 1997 otoritas moneter menaikkan suku bunga yang semula 7 % menjadi 30 %.

Pengujian secara parsial variabel *net export* ($\ln Y_t$) terhadap GDP ($\ln Y_d$), diperoleh t-statistic sebesar -1.086 dan Prob (t) sebesar 0.284. Karena nilai Prob > 0.05, mengindikasikan bahwa *net export* ($\ln Y_t$) tidak signifikan mempengaruhi GDP ($\ln Y_d$).

Tidak signifikannya *net export* mempengaruhi GDP Hal tersebut disebabkan beberapa hal. Diantaranya adalah kecilnya proporsi ekspor terhadap GDP. Menurut Martowadjojo dalam Noviani (2012), tingginya GDP di Indonesia didominasi oleh sektor konsumsi, sedangkan ekspor hingga kuartal III tahun 2011 hanya menyumbang 5% terhadap GDP.

Negara tujuan ekspor Indonesia juga tidak banyak. Hal tersebut yang membuat net ekspor tidak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Korea, dan China merupakan daerah tujuan utama ekspor Indonesia dengan pangsa ekspor lebih dari separuh total ekspor Indonesia. Selain itu, terdapat masalah lain yang membuat ekspor tidak cukup kuat mendorong GDP. Rasio impor Indonesia terhadap GDP juga cukup besar.

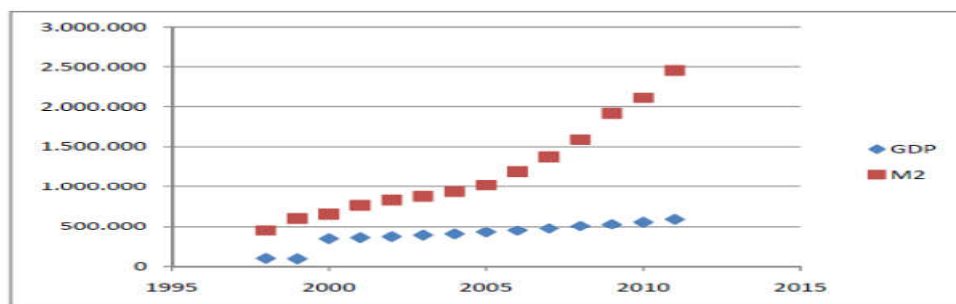
Berdasarkan hasil penelitian BI (2008), rasio ekspor terhadap GDP pada tahun 2006 sebesar 27,7%, sedangkan rasio impor terhadap GDP sebesar 16,8%. Meskipun rasio ekspor lebih besar dibandingkan rasio impor terhadap GDP, rasio ekspor tetap tidak mampu menutupi besarnya rasio impor terhadap GDP. Hal tersebut dikarenakan pengeluaran jasa yang semakin besar, sehingga penerimaan ekspor terutama non migas belum mampu untuk menutupi kebutuhan impor dan pembayaran jasa-jasa (Husaini, 2010).

Pengujian secara parsial variabel kurs relatif atau selisih kurs ($\ln e/\ln e^*$) terhadap *money supply* ($\ln M_s$), diperoleh t-statistic sebesar -3.447 dan Prob (t) sebesar 0.001. Karena nilai Prob < 0.05, mengindikasikan bahwa selisih kurs ($\ln e/\ln e^*$) signifikan mempengaruhi *money supply* ($\ln M$).

Ekspektasi kurs efektif mempengaruhi *money supply* melalui pasar uang yaitu melalui transaksi jual beli valas. Ketika ekspektasi kurs akan mengalami apresiasi, masyarakat akan lebih banyak membeli Rupiah pada saat ini. Dengan demikian, di masa yang akan datang, Rupiah tersebut bisa dijual kembali untuk mendapatkan jumlah dollar yang lebih banyak.

Sebaliknya jika ekspektasi kurs akan mengalami depresiasi, masyarakat pada saat ini akan lebih banyak membeli dollar. Dengan demikian di masa yang akan datang, dollar tersebut bisa dijual kembali untuk mendapatkan jumlah Rupiah yang lebih banyak. Pembelian dollar tersebutlah yang pada akhirnya membuat Rupiah lebih banyak beredar di masyarakat. Akibatnya *money supply* meningkat.

Pengujian secara parsial variabel GDP ($\ln Y_d$) terhadap *money supply* ($\ln M$), diperoleh t-statistic sebesar 8.099 dan Prob (t) sebesar 0.000. Karena nilai Prob < 0.05, mengindikasikan bahwa GDP signifikan mempengaruhi *money supply*. Ketika GDP semakin meningkat, maka semakin banyak perputaran uang dan transaksi di masyarakat. Hal tersebutlah yang membuat jumlah uang beredar semakin meningkat. Gambar 7 menunjukkan perkembangan GDP serta *money supply* di Indonesia:



Sumber: BI berbagai edisi, diolah.

Gambar 7: Hubungan GDP dan Money Supply

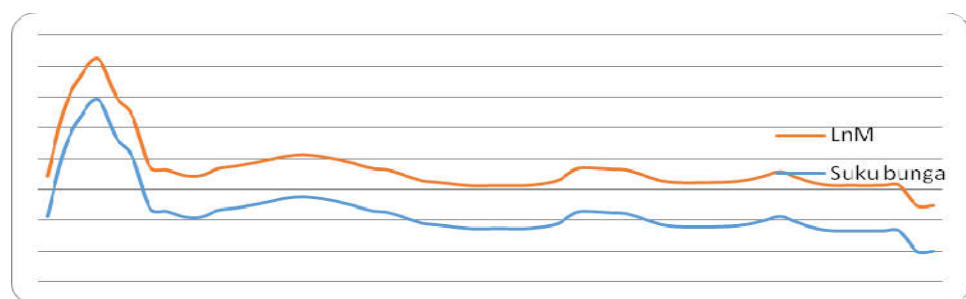
Pengujian secara parsial variabel SBI (rd) terhadap *money supply* ($\ln M$), diperoleh t-statistic sebesar 2.135 dan Prob (t) sebesar 0.038. Karena nilai Prob < 0.05, mengindikasikan bahwa SBI signifikan *money supply*. Namun

hubungan tingkat suku bunga dengan *money supply* bukan menghasilkan hubungan yang negatif seperti teori, melainkan hubungan yang positif. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, terutama pada saat krisis finansial tahun 1997.

Pada tahun 1997 ketika terjadi krisis finansial, tingkat inflasi meningkat hingga level kurang lebih sebesar 77% (Ulfa dan Aliasuddin, 2010). Sehingga BI berusaha mengendalikan inflasi tersebut dengan cara meningkatkan suku bunga hingga level 56%. Namun kenaikan tingkat suku bunga tersebut tidak berpengaruh terhadap *money supply* karena meningkatnya *money supply* lebih dikarenakan terdepresiasi Rupiah.

Faktor kedua, ketika terjadi krisis 1997, kepercayaan masyarakat terhadap bank menurun. Periode pengamatan yang dilakukan penulis pada dasarnya masih dipengaruhi oleh krisis dari tahun 1997. Sehingga meningkatnya jumlah uang beredar juga dipengaruhi oleh *bank runs*, dimana permintaan uang cukup tinggi, sedangkan penawaran uang terus merosot (Restiyanto, 2008). Kemudian banyaknya bank yang dilikuidasi juga mengakibatkan masyarakat tidak percaya pada sektor perbankan. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk memegang uangnya secara tunai.

Semakin tingginya jumlah uang beredar tidak terlepas dari kebijakan deregulasi perbankan khususnya kemudahan untuk mendirikan bank. Gambar 8 memperlihatkan perkembangan hubungan tingkat suku bunga dan *money supply* ($\ln M$). Akibat kebijakan tersebut, banyak bank-bank baru yang berdiri di Indonesia. Dengan berdirinya banyak bank baru tersebut membuat jumlah uang beredar semakin banyak di masyarakat (Aji, 2007).



Sumber: BI berbagai edisi, diolah.

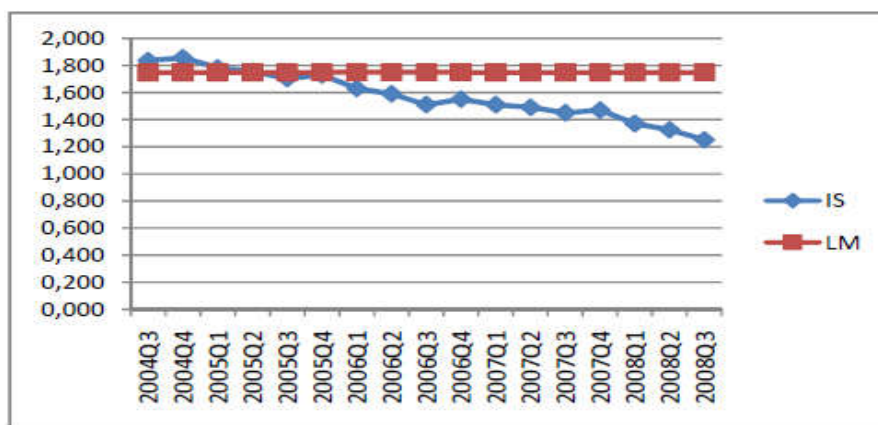
Gambar 8: Perkembangan Tingkat Suku Bunga dan Money Supply

Berdasar hasil estimasi trial and error persamaan IS – LM yaitu:

$$\ln Yd = -9.690 + 1.012 \ln e + 0.674 \ln G - 0.001 Rd - 0.111 \ln Yt \dots(3)$$

$$\ln M = 11.345 - 6.507 \ln e / \ln e^* + 0.786 \ln Yd + 0.003 Rd \dots\dots\dots(4)$$

didapatkan titik keseimbangan GDP sebesar $\ln 12,99$ dan tingkat suku bunga sebesar 7,79%. Jika GDP dibuat secara nominal maka $\ln 12,99$ menjadi Rp. 438011 milyar. Keseimbangan GDP dan tingkat suku bunga dapat dilihat pada gambar 9.



Gambar 9:Keseimbangan Awal Suku Bunga dan GDP (*Internal Balances*)

Berdasar gambar 5.4, dapat dilihat bahwa titik pertemuan IS dan LM berada pada periode 2005 kuartal II. Pada tabel periode 2005 kuartal II mempunyai nilai GDP sebesar $\ln 12,99$ dan tingkat suku bunga sebesar 7,79%. Estimasi data memang bermula pada tahun 1998 hingga 2011, namun pada pembahasan keseimbangan tingkat suku bunga dan GDP, hanya ditampilkan gambar grafik tahun 2004 hingga 2008 untuk mempermudah pengamatan titik temu (ekuilibrium) awal oleh pembaca.

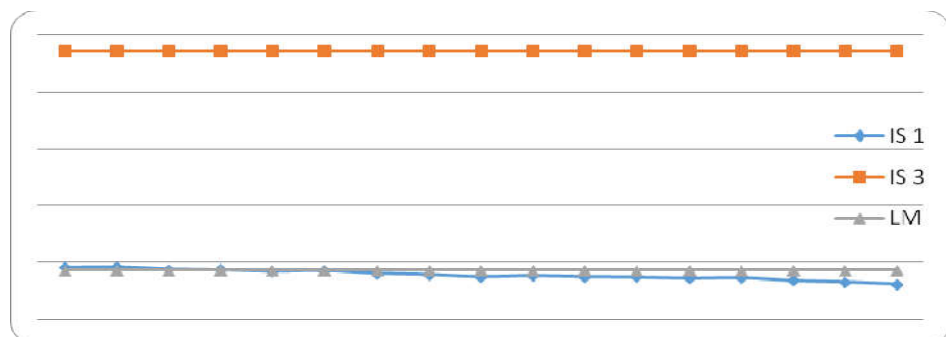
Setelah menemukan titik keseimbangan atau *internal balance*, simulasi pertama yang dilakukan adalah memasukan stimulus fiskal sebesar 0,9 % dan 1,4 % dari GDP. Besaran stimulus fiskal diambil berdasarkan *history* stimulus fiskal anggaran pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya. Besaran stimulus fiskal sebesar kurang dari 1% dari GDP diambil ketika gejala krisis global mereda. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Anggito Abimanyu mengungkapkan stimulus fiskal 2010 tidak lebih dari 1% dari

GDP. Oleh karena itu penelitian ini mengambil besaran stimulus fiskal sebesar 0,9% sebagai dasar simulasi. Kemudian, besaran stimulus fiskal sebesar 1,4% diambil pemerintah ketika terjadi gejala krisis global (Depkeu, 2009).

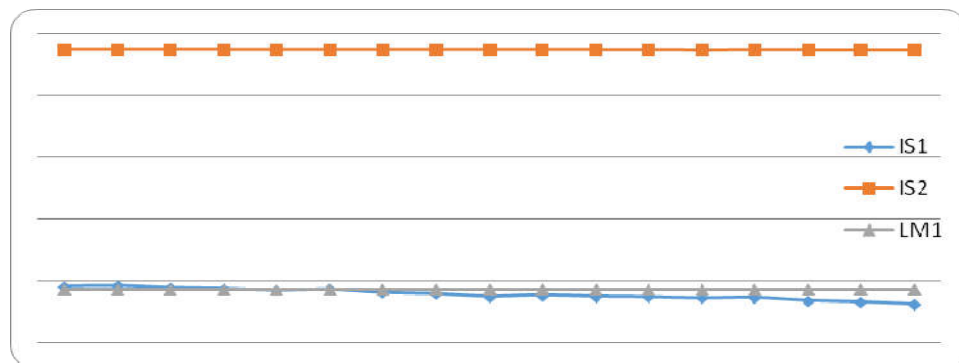
Hasil simulasi pertama pada stimulus fiskal sebesar 1,4%, menghasilkan pergeseran IS yang sangat signifikan. Begitu pula pada stimulus fiskal sebesar 0,9% (Gambar 10 dan 11).

Menurut Sunarsip (2011), konsumsi rumah tangga adalah sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam menyusun GDP. Sehingga stimulus fiskal yang diberikan pemerintah untuk mendorong dapat merangsang masyarakat untuk lebih meningkatkan konsumsinya lagi. Terutama bila terjadi penurunan daya beli masyarakat, insentif fiskal yang diberikan secara langsung kepada masyarakat efektif untuk kembali mendorong daya beli masyarakat.

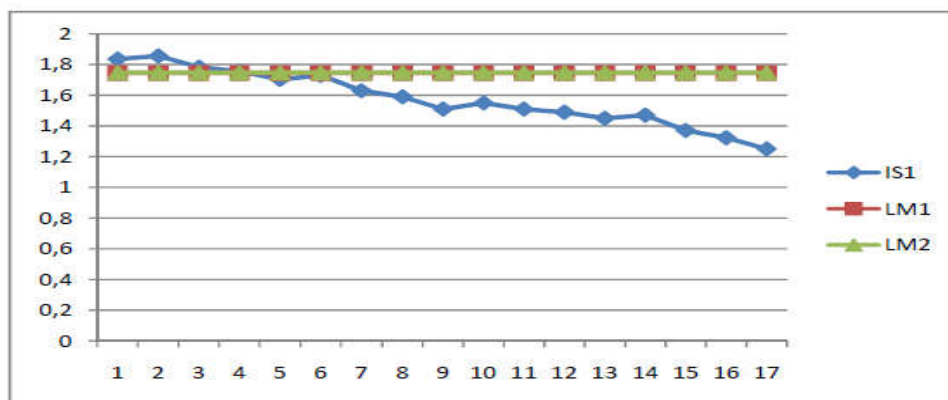
Simulasi kedua berupa kebijakan moneter longgar (*easy money policy*). Berdasar kondisi semula (*internal balances*), tingkat suku bunga keseimbangan adalah 7,79%, sehingga penulis mencoba melakukan simulasi untuk menurunkan tingkat suku bunga. Dengan pertimbangan untuk melihat apakah tingkat suku bunga yang rendah efektif untuk mendorong GDP. Penulis menggunakan acuan BI rate untuk melakukan simulasi *easy money policy*, yaitu sebesar 6% (Gambar 5.6).



Gambar 10: Pergeseran IS Ketika Stimulus Fiskal 1,4%

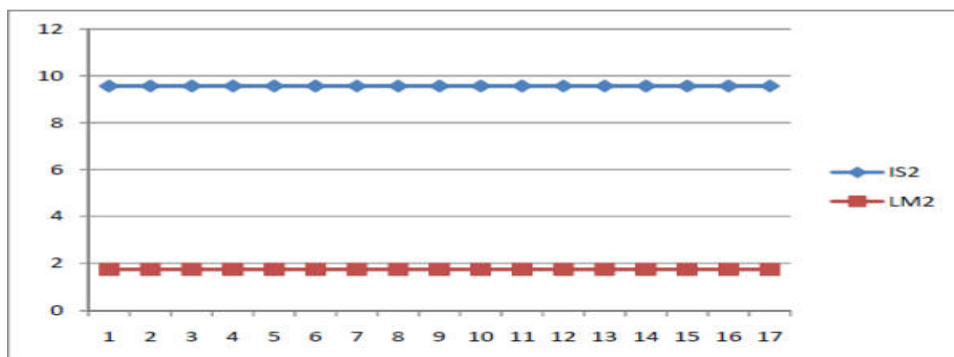


Gambar 11: Pergeseran IS Ketika Stimulus Fiskal 0,9%



Gambar 12: Pergeseran Kurva LM Ketika Suku Bunga Diturunkan

Pada gambar 12 dapat dilihat bahwa perekonomian Indonesia tidak responsif terhadap penurunan tingkat suku bunga dan cenderung untuk stagnan. Berikutnya penulis mencoba menggabungkan antara simulasi pertama dan kedua, yaitu menggabungkan kebijakan fiskal dan moneter. Berdasar gambar 13, dapat dilihat bahwa faktanya di Indonesia, interaksi kebijakan fiskal dan moneter belum mampu menciptakan *internal balances*.



Gambar 13: Interaksi Kebijakan Fiskal dan Moneter

Responsifnya perekonomian dalam menanggapi stimulus fiskal pemerintah terkait dengan waktu. Dalam kebijakan moneter, diperlukan sasaran antara untuk mengendalikan suatu besaran moneter. Selain itu, juga diperlukan jangka waktu sekitar 6-12 bulan bagi sektor keuangan perbankan untuk dapat merespon atau menanggapi kebijakan moneter yang ditetapkan sesuai dengan kondisi makro saat itu. Berbeda dengan kebijakan moneter, stimulus fiskal hanya memerlukan waktu yang singkat untuk mempengaruhi perekonomian, karena tujuan utama kebijakan fiskal adalah peningkatan daya beli masyarakat guna mendorong GDP. Zakik (2012) menyebutkan bahwa kebijakan moneter pada dasarnya hanya efektif dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, kebijakan fiskal lebih efektif untuk menstabilkan perekonomian.

Responsifnya perekonomian terhadap stimulus fiskal membawa resiko lain, yaitu tidak terbentuknya *internal balances* seperti yang ada pada gambar 5.9. Tingginya GDP lebih membawa perekonomian terhadap inflasi yang tinggi. Tidak mengherankan karena faktanya inflasi di Indonesia cenderung untuk tinggi. Semakin tinggi tingkat GDP, semakin besar permintaan uang masyarakat untuk digunakan sebagai konsumsi. Dengan demikian semakin banyak uang yang dipergunakan untuk bertransaksi, sehingga menyebabkan inflasi.

Banyak hal yang menyebabkan perekonomian tidak responsif terhadap penurunan tingkat suku bunga. Hal yang utama adalah banyaknya variabel antara pada mekanisme kebijakan moneter ketika ingin mencapai suatu sasaran atau target ekonomi. Sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama agar target atau tujuan ekonomi yang diinginkan tercapai.

Faktor lain yang menyebabkan tidak responsifnya perekonomian terhadap tingkat suku bunga (kebijakan moneter) adalah lambannya sektor perbankan dalam merespon penurunan tingkat suku bunga. Hal tersebut disebabkan masih kurang stabilnya kondisi makro di Indonesia. Selain itu juga disebabkan perbedaan aset antar bank yang sangat signifikan. Sehingga jika salah satu bank menurunkan bunga, maka dikhawatirkan terjadi migrasi dana besar-besaran. Dengan demikian sektor perbankan tetap mempertahankan suku bunga nyatetap tinggi. Akibatnya investasi tidak kunjung berkembang dan dunia usaha menjadi terbebani biaya modal yang lebih besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga tidak efektif dalam mempengaruhi kegiatan di sektor riil (Sugema).

Faktor lain yang menyebabkan sektor perbankan enggan untuk menurunkan suku bunganya terkait dengan investor asing. Dana yang besar merupakan modal utama untuk membangun sektor perekonomian. Dana tersebut salah satunya berasal dari modal asing yang ditanamkan oleh investor asing di Indonesia. Oleh karena itu, sektor finansial di Indonesia mempertahankan suku bunganya tetap tinggi untuk menarik minat investor asing tersebut agar mau menanamkan modalnya di Indonesia dan tidak menarik dananya keluar dari Indonesia.

Keefektifan kebijakan moneter juga diteliti oleh Arifin (2008). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifin (1998), menunjukkan hasil bahwa kebijakan moneter efektif jika tidak ada faktor-faktor lain yang mengganggu. Namun pada kenyataannya, di Indonesia ada faktor-faktor lain yang mengakibatkan kebijakan moneter tidak efektif khususnya pada masa krisis. Contohnya tingginya inflasi dari sisi penawaran dan adanya kerusakan sosial. Disamping itu, iklim investasi di Indonesia serta prospek ekonomi yang kurang menjanjikan menjadi faktor kurang efektifnya kebijakan moneter di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil estimasi data time series, penelitian ini menyimpulkan bahwa hingga saat ini masih belum dapat tercipta suatu equilibrium atau keseimbangan ekonomi (GDP dan tingkat suku bunga) . Ketika dilakukan simulasi berupa stimulus fiskal, hasil menunjukkan bahwa kebijakan fiskal efektif mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya ketika dilakukan

simulasi kebijakan moneter, hasil menunjukkan bahwa perekonomian tidak responsif terhadap kebijakan tersebut. Sehingga ketika kebijakan fiskal dan moneter diinteraksikan, tidak dapat terbentuk suatu keseimbangan (*internal balances*).

Implikasinya dari hasil penelitian ini adalah antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi bersifat *trade off*, sehingga sulit untuk menciptakan suatu kestabilan makroekonomi khususnya internal balances. Kemudian, dengan efektifnya kebijakan fiskal, maka tentunya beban anggaran pemerintah yang harus dikeluarkan untuk mendorong perekonomian menjadi semakin besar.

Belum terciptanya suatu keseimbangan internal balances, antara kebijakan fiskal dan moneter sebaiknya menyamakan persepsi dan tujuan makroekonomi bersama sehingga bisa merumuskan kebijakan secara bersama-sama.

Kebijakan fiskal efektif mempengaruhi perekonomian Indonesia. Dengan demikian pemerintah harus mengambil alih atau melakukan banyak intervensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian dalam hal APBN, sebaiknya ditujukan untuk sektor-sektor yang produktif sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Merujuk pada pembahasan dan kesimpulan, kebijakan moneter tidak efektif untuk mempengaruhi perekonomian di Indonesia khususnya akibat iklim investasi yang tidak kondusif serta ketidakstabilan makroekonomi dan sulitnya mendirikan usaha. Oleh karena itu, sebaiknya Pemerintah dan otoritas moneter menciptakan citra yang baik dalam hal iklim investasi. Disamping itu juga menciptakan insentif kepada masyarakat untuk mendorong investasi di sektor riil

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyo, Anggito. 2009. *Anggaran Stimulus Fiskal Dibawah Satu Persen dari PDB*. pelita.or.id, diakses 15 Februari 2012.
- Arifin, Sjamsul. 1998. *Efektifitas Kebijakan Suku Bunga Dalam Rangka Stabilisasi Rupiah Di Masa Krisis*. www.bi.go.id, diakses 20 Februari 2012.

- Assery, Syeh. 2009. *Tentang Pengeluaran Pemerintah*. globalmanagement.wordpress.com, diakses 13 Februari 2012.
- Bank Indonesia. 2008. *Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012*. www.bi.go.id, diakses 24 Januari 2012.
- Boediono. 2008. *Pemerintah Keluarkan Kebijakan Fiskal Stabilkan Harga Bahan Pokok*. adie-wongindonesia.blogspot.com. diakses 29 Januari 2012
- Depkeu. 2009. *Optimalisasi Stimulus Fiskal untuk Pemulihan Sektor Riil*. depkeu.go.id, diakses 15 Februari 2012.
- Dornbusch, Rudiger & Fischer, Stanley. 1988. *Makroekonomi*. Ed.4. Jakarta: Erlangga
- Enders, Walter. 1995. *Applied Econometrics*.
- Goeltom, Miranda S. 2007. *Essays in Macroeconomic Policy: The Indonesian Experience*. Jakarta: PT..Gramedia Pustaka Utama.
- Hasan, Aynul dan Isgut, Alberto, 2009. *Effective Coordination of Monetary and Fiscal Policies: Conceptual Issues and Experiences of Selected Asia-Pacific Countries*.
- Hosain Ahtar-et al. 1993. *Open-Economy Macro Model*.
- Kurniawan, Taufik . 2004. *Determinan Tingkat Suku Bunga Pinjaman Di Indonesia Tahun 1983 – 2002*. www.bi.go.id. diakses 3 Februari 2012.
- Madjid, Nurcholis. 2007. *Analisis Efektivitas Antara Kebijakan Fiskal Dan Kebijakan Moneter Dengan Pendekatan Model IS - LM (Studi Kasus Indonesia Tahun 1970 - 2005)*. eprints.undip.ac.id, diakses 27 Januari 2012.
- Mankiw, Gregory. 2003. *Teori Makroekonomi*. Ed:5. Jakarta: Erlangga.
- Martono, Nanang. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mukhlis. 2010. *Kausalitas Antara Nilai Tukar Rp/US\$ dengan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. drmukhlis.blogspot.com, diakses 3 Februari 2012

- Purnomo, Lisa Wahyuningrum. 2003. *Analisis Pengaruh tingkat inflasi, suku bunga, kurs dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap return saham di bursa efek Jakarta*. eprints.undip.ac.id. diakses 3 Februari 2012.
- Sunarsip. 2011. *Mendesain Kebijakan Stimulus Fiskal Yang Efektif*. www.sunarsip.com, diakses 20 Februari 2012.
- Zakik. 2012. *Analisa Efektivitas Kebijakan Moneter Dan Kebijakan Fiskal Terhadap Tingkat Pendapatan Per Kapita (Studi Kasus Negara Indonesia Dan Republik Islam Iran Tahun 1980-2009)*. www.pskttt-ii.com, diakses 20 Februari 2012.

QUANTITATIVE ECONOMICS JOURNAL WRITING GUIDANCE

The journal is published by the Department of Economics, Post Graduate Program State University of Medan in online and print editions. This journal contained the articles of economics, both the results of research and engineering ideas that are quantitative. The views expressed in this publication are those of the author(s) and do not necessarily reflect those of Department of Economics, Post Graduate Program, State University of Medan.

The journal is published four times a year, ie in March (first volume), June (second volume), September (third volume), and December (fourth volume). All contents of this journal can be viewed and downloaded free of charge at the website address: <http://qe-journal.unimed.ac.id> . We invite all parties to write in this journal. Paper submitted in soft copy (file) to <http://qe-journal.unimed.ac.id> . See the writing guide on the back of this journal.

GENERAL GUIDELINES

1. Scripts must be original work of the authors (individuals, groups or institutions) that do not violate copyright.
2. Manuscripts submitted have not been published or not published and is being sent to other publishers at the same time.
3. Copyrighted, published manuscripts and all its contents remain the responsibility of the author.
4. Highly recommended to submit the manuscript in the form of soft copy (file) to <http://qe-journal.unimed.ac.id>.
5. Manuscript restricted ranges 15-17 A4 pages, single spaced, font Palatino Linotype with font size 11.
6. Mathematical equations and symbols, please written using Microsoft Equation.
7. Scripts can be written in the Indonesian language or in English.
8. Each manuscript must be accompanied by abstract of about 150-250 words. Abstract written in English, and keywords.
9. Title tables and figures are written parallel to the image / table, sentence case, with 6 pt spacing of tables or pictures. Title of the table is placed on top of the table, while the image title is placed below the image. Writing the source tables or images are placed under the tables and figures with 10 pt font).

example:

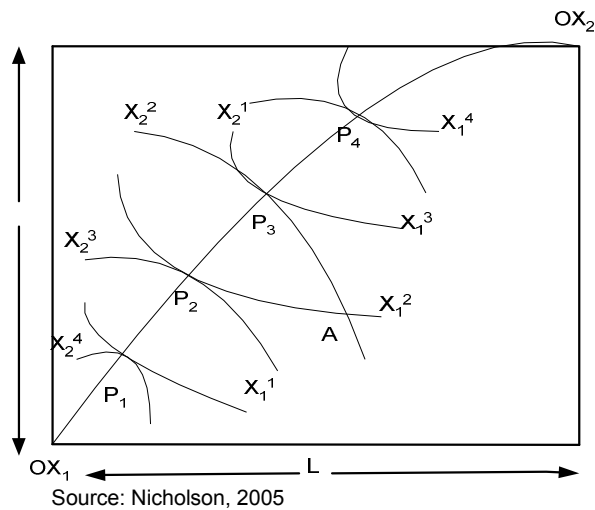


Figure 2. Equilibrium In Production Sector

Table 2. The Impact of Policy Scenario

Household	Changes		
	Simulation 1_a	simulation 1_b	simulation 1_c
HUNPOOR	-0.3892	-1.2256	-2.4192
HUPOOR	-0.4024	-1.2694	-2.4618
HRNPOOR	-0.3640	-1.1587	-2.3256
HRPOOR	-0.3406	-1.0840	-2.1471

Source: Maipita and Jantan (2010)

10. Citation of references follow the following rules:
 - a. Single author (Maipita, 2010) or Maipita (2010).
 - b. Two authors (Maipita and Males, 2011) or Maipita and Males (2011).
 - c. More than two authors: (Maipita et al., 2011) or Maipita et al. (2011).
 - d. Two sources with writing the same quote but a different year (Chiang, 1984; Dowling, 1995).
 - e. Two sources with writing the same quote but a different year (Friedman, 1972; 1978).
 - f. Two quotes from a writer but the same year (Maipita, 2010a, 2010b).
 - g. Excerpts from the agency, preferably in acronyms (BPS, 2001).
11. Manuscript must be accompanied by the data authors, institutional addresses and e-mail that can be contacted. It is advisable to write the biographical data in the form of CV (curriculum vitae) short.

SPECIAL GUIDELINES

The structure of the writing in this journal are as follows:

THE TITLE OF ARTICLE

The first author's name,

Institution, address,

Tel., Email:

The second author's name

The author's name etc.

example:

THE MODEL OF POVERTY EVALUATION PROGRAM

Mohd. Dan Jantan

Department of Economics, Universiti Utara Malaysia, Kedah, Malaysia

Te.: +604-928 3543, E-Mail: djantan@uum.edu.my

Abstract

Abstract written in English as much as 150-250 words. Abstract written in one paragraph, containing briefly the purpose, research methods and results.

Keywords: (maximum of 5 keywords)

JEL Classification:

INTRODUCTION

This section contains a brief research background, objectives, and support the theory. If it is not very important, this portion does not need to use a subtitle or subsection.

RESEARCH METHODS

Describe the research method used is concise and clear on this portion. This portion may contain subsections or subtitled but do not need to use the numbering.

RESULTS AND DISCUSSION

This section is the part most of all parts of the article, contains a summary of data, data analysis, research and discussion. This section should only contain sub-section without numbering.

CONCLUSION AND SUGGESTIONS

Contains the results or conclusions of research findings in brief and concise. While the advice is a recommendation based on research results and / or further research suggestions.

REFERENCES

Bibliography contains only a reference that actually referenced in the article. Not justified to include references that are not referenced in the article to this section.

Some specific provisions of the writing of the bibliography are as follows:

- References are sorted alphabetically (ascending).
- Posting the author's name follows the form: last name, first name.
- Systematics of writing for a book: author's name. year of publication. Book title. Publisher, city. example:

Maipita, Indra. 2010. *Quantitative Methods of Economic Research*. Madinatera, Medan.

- Systematics of writing for journals: author's name. year of publication. Writing title. name of the journal. Volume, number (page). example:
Maipita, Indra., Dan Jantan, and Noor Azam. 2010. The Impact of Fiscal Policy Toward Economic Performance and Poverty Rate in Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking* Vol 12, Number 4, April 2010 (391-424).
- Systematics of writing for the thesis/dissertation: The name of the author. years. The title. Thesis / Dissertation. The University. example:
Maipita, Indra. 2011. *The Impact Analysis of Fiscal Adjustment on Income Distribution and Poverty in Indonesia: Computable General Equilibrium Approach*. Dissertation. Universiti Utara Malaysia.
- Systematics of writing for an article from the internet: the name of the author. years. Title of the paper. Accessed from the website address at the date of month year. example:
Friedman, J. (2002). *How responsive is Poverty to Growth?: A Regional Analysis of Poverty, Inequality, and Growth in Indonesia, 1984-1999*. Retrieved from www.ciaonet.org/wps/frj02/ on January 19, 2009.
- Systematics of writing for an article in the newspaper/magazine: the name of the author. date, month and year of publication. Title of the paper. The name of the newspaper. Publisher, city.

QUANTITATIVE ECONOMICS JOURNAL KETENTUAN PENULISAN ARTIKEL

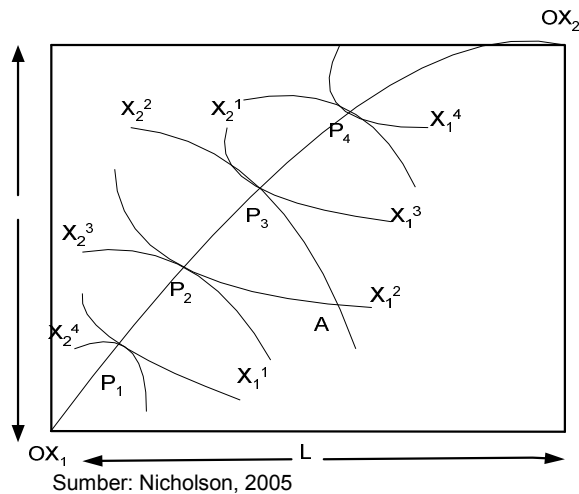
Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan dalam edisi online dan cetak. Berisi artikel bidang Ilmu Ekonomi baik hasil penelitian maupun rekayasa ide yang bersifat kuantitatif. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan di jurnal ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis.

Jurnal ini diterbitkan empat kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret (volume pertama), Juni (volume kedua), September (volume ketiga), dan Desember (volume keempat). Artikel dapat ditulis dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Semua isi jurnal ini dapat dilihat dan diunduh secara cuma-cuma pada alamat website: <http://qe-journal.unimed.ac.id>. Kami mengundang semua pihak untuk menulis pada jurnal ini. Paper dikirimkan dalam bentuk soft copy *soft copy* ke alamat <http://qe-journal.unimed.ac.id>. *Setiap penulis dapat memantau artikel yang dikirimnya melalui laman tersebut, karena jurnal ini dikelola secara online penuh.*

KETENTUAN UMUM

1. Naskah harus merupakan karya asli penulis (perorangan, kelompok atau institusi) yang tidak melanggar hak cipta.
2. Naskah belum pernah dimuat atau diterbitkan dan tidak sedang dikirimkan ke penerbit lain pada waktu yang bersamaan.
3. Hak cipta naskah yang diterbitkan beserta segala tanggungjawab isinya tetap pada penulis.
4. Naskah dikirim dalam bentuk *soft copy* (file) secara *online* ke alamat <http://qe-journal.unimed.ac.id>.
5. Naskah dibatasi berkisar 15-17 halaman berukuran A4, spasi satu, huruf Palatino Linotype dengan ukuran huruf 11.
6. Persamaan matematis dan simbol, harap ditulis menggunakan *Microsoft Equation*.
7. Naskah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau dalam Bahasa Inggris.
8. Setiap naskah harus disertai Abstrak sekitar 150-250 kata. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris, beserta kata kuncinya.
9. Judul tabel dan gambar ditulis sejajar gambar/tabel, dengan jarak 6 pt dari tabel atau gambarnya. Judul tabel diletakkan di atas tabel, sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar. Penulisan sumber tabel atau gambar diletakkan di bawah tabel atau gambar dengan huruf 10 pt).

Contoh:



Gambar 2. Keseimbangan di Sektor Produksi

Tabel 2. Dampak Skenario Kebijakan

Rumahtangga	Perubahan		
	Simulasi 1_a	simulasi 1_b	simulasi 1_c
HUNPOOR	-0.3892	-1.2256	-2.4192
HUPOOR	-0.4024	-1.2694	-2.4618
HRNPOOR	-0.3640	-1.1587	-2.3256
HRPOOR	-0.3406	-1.0840	-2.1471

Sumber: Maipita dan Jantan (2010)

10. Pengutipan bahan rujukan mengikuti aturan berikut:
 - a. Penulisan tunggal (Maipita, 2010) atau Maipita (2010)
 - b. Dua penulis (Maipita dan Jantan, 2011) atau Maipita dan Jantan (2011)
 - c. Penulis lebih dari dua orang : (Maipita *et al*, 2011) atau Maipita *et al* (2011)
 - d. Dua sumber kutipan dengan penulisan yang sama tetapi tahunnya berbeda (Chiang, 1984; Dowling. 1995)
 - e. Dua sumber kutipan dengan penulisan yang sama tetapi tahunnya berbeda (Friedman. 1972; 1978)
 - f. Dua kutipan dari seorang penulis tapi tahunnya sama (Maipita. 2010a, 2010b)
 - g. Kutipan dari instansi, sebaiknya dalam singkatan lembaga (BPS, 2001)
11. Naskah harus disertai dengan biodata penulis, alamat institusi dan e-mail yang dapat dihubungi. Disarankan untuk menulis biodata dalam bentuk CV (curriculum vitae) pendek.

KETENTUAN KHUSUS

Struktur penulisan dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:

JUDUL ARTIKEL

Nama penulis pertama,

Institusi, alamat,

Telp., email:

Nama penulis kedua

Nama penulis seterusnya

Contoh:

MODEL ESTIMASI NILAI TAMBAH BRUTO SEKTOR PERTANIAN TERHADAP AKUMULASI INVESTASI

Mohd. Dan Jantan

Department of Economics, Universiti Utara Malaysia, Kedah, Malaysia

Te.: +604-928 3543, E-Mail: djantan@uum.edu.my

Abstract

Abstrak ditulis dalam bahasa inggris dengan banyak kata 150-250 kata. Abstrak ditulis dalam satu paragraf, memuat secara singkat tujuan, metode penelitian dan hasil.

Keywords: (maksimum 5 kata kunci)

JEL Classification:

PENDAHULUAN

Bahagian ini memuat latar belakang penelitian secara singkat, tujuan, serta dukungan teori. Jika tidak sangat penting, bahagian ini tidak perlu menggunakan subjudul atau subbahagian.

METODE PENELITIAN

Uraikan metode penelitian yang digunakan secara ringkas dan jelas pada bahagian ini. Bahagian ini boleh memuat subbab atau subjudul namun tidak perlu menggunakan penomoran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahagian ini merupakan bahagian terbanyak dari semua bahagian artikel, memuat data secara ringkas, analisis data, hasil penelitian dan pembahasan. Bahagian ini boleh saja memuat subbab tanpa penomoran.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan berisi hasil atau temuan penelitian secara ringkas dan padat. Sedangkan saran merupakan rekomendasi berdasarkan hasil kajian dan/atau saran penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka hanya memuat referensi yang benar-benar dirujuk dalam artikel yang ditulis. Tidak dibenarkan mencantumkan referensi yang tidak dirujuk dalam tulisan ke bahagian ini.

Beberapa ketentuan khusus dari penulisan daftar pustaka adalah:

- Daftar pustaka diurutkan berdasarkan abjad (*ascending*).

- Penulisan nama penulis mengikuti bentuk: nama belakang, nama depan.
 - Sistematika penulisan untuk buku: nama penulis. tahun publikasi. *Judul Buku*. Penerbit, kota. Contoh :
Maipita, Indra. 2010. *Metode Penelitian Ekonomi Kuantitatif*. Madinatera, Medan.
 - Sistematika penulisan untuk jurnal: nama penulis. tahun publikasi. Judul Tulisan. *nama jurnal*. Volume, nomor (halaman). Contoh:
Maipita, Indra., Dan Jantan, Noor Azam. The Impact of Fiscal policy Toward Economic Performance and Poverty Rate in Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking* Vol 12, Number 4, April 2010 (391-424).
 - Sistematika penulisan untuk skripsi/tesis/disertasi: Nama penulis. tahun. *Judul. Skripsi/Tesis/Disertasi*. Universitas. Contoh:
Maipita, Indra. 2011. *The Analysis of Fiscal Adjustment Impact on Income Distribution and Poverty in Indonesia: Computable General Equilibrium Approach*. Dissertation. Universiti Utara Malaysia.
 - Sistematika penulisan untuk artikel dari internet: nama penulis. tahun. *Judul tulisan*. Diakses dari alamat website pada tanggal bulan tahun. Contoh:
Friedman, J. (2002). *How responsive is Poverty to Growth?: A Regional Analysis of Poverty, Inequality, and Growth in Indonesia, 1984-1999*. Retrieved from www.ciaonet.org/wps/frj02/ on January 19, 2009
- Sistematika penulisan untuk artikel dalam koran/majalah: nama penulis. tanggal, bulan dan tahun publikasi. Judul tulisan. *Nama koran*. Penerbit, kota.



9 772089 799007

Quantitative
Qeconomics
Journal



9 772089 784003